

**LAPORAN
KINERJA INTERIM
TWI 2025**

**LAPORAN
KINERJA
INTERIM**

BALAI BESAR POM DI SEMARANG

**JL. SUKUN RAYA NO.41 A, SRONDOL WETAN, KEC.
BANYUMANIK, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50263**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja diukur dari 9 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada TW I Tahun 2025 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada TW I Tahun 2025, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR	Target 2025	TW I				
					Target	Realisasi	Capaian	Konversi	NPSK
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	87	88,02	101,17	101,17	107,11
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26					
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	93,20	109,65	109,65	
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar <i>(Tidak Masuk dalam Perhitungan NKO)</i>	100	100				
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125,00	110,00	
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	56	60,82	108,61	108,61	
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90,29	100,32	100,32	
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan <i>(Tidak Masuk dalam Perhitungan NKO)</i>	85	85				
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan <i>(Tidak Masuk dalam Perhitungan NKO)</i>	96,75	96,75				
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125,00	110,00	
		11	Persentase ikan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,87	85,87	99,52	115,90	110,00	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54	16,82	15,89	94,47	94,47	94,47
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Semarang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79,7	70,31	82,40	117,20	110,00	110,00
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	86,42	90,25	104,43	104,43	103,43
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	20%	25%	125,00	110,00	
		16	Jumlah desa pangan aman	6	28%	25%	89,29	89,29	
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	20%	25%	125,00	110,00	

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR	Target 2025	TW I				
					Target	Realisasi	Capaian	Konversi	NPSK
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91	24,17	28,33	117,21	110,00	110,00
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	85	35	39	111,43	110,00	110,00
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100,00	100,00	100,00
8	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	21	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,70					
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43					
		23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82					
		24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	91,02					
		25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,6					
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)									105,00
									Istimewa

Dari hasil NPS diatas, diperoleh nilai sebesar 105,00% dengan kriteria “Istimewa”, Untuk hasil NPSK masing-masing 3 indikator menunjukkan dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” yaitu “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang” sebesar 110,00 , “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” sebesar 110,00, dan “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang” sebesar 110,00 . Kemudian 2 indikator menunjukkan hasil dengan kriteria “Sangat Baik” yaitu “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang” sebesar 107,11 , dan “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang” sebesar 103,43 . Kemudian 2 indikator menunjukkan hasil dengan kriteria “Baik” yaitu “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” sebesar 94,47 dan “Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif” sebesar 100. Kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

1. SK 1.Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang di ukur dengan 11 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 yaitu Sebesar **107,11 (Sangat Baik)**. Dari 11 IKU terdapat 4 iku tercapai dengan sangat baik, 3 IKU tidak dapat disimpulkan, 1 IKU di ukur di akhir tahun, dan 3 IKU tidak diukur karena di *exclude* dari perhitungan NPSS. Ini mendakan bahwa BBPOM Semarang telah efektif dalam mengawasi produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerjanya.

2. SK 2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 yaitu Sebesar **94,47 (Baik)**. Ini mendakan bahwa BBPOM Semarang telah efektif dalam mengawasi Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerjanya.
3. SK 3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang di ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 yaitu Sebesar **110 (Tidak dapat disimpulkan)**. Ini mendakan bahwa BBPOM Semarang telah mampu menguatkan Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerjanya.
4. SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Semarang di ukur dengan 4 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 yaitu Sebesar **103,43 (Sangat Baik)**. Ini menandakan bahwa BBPOM Semarang telah efektif dalam melaksanakan KIE di wilayah kerjanya.
5. SK 5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 yaitu Sebesar **110 (Tidak dapat disimpulkan)**. Ini menandakan bahwa BBPOM Semarang telah mampu meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di wilayah kerjanya.
6. SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang di ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 yaitu Sebesar **110 (Tidak dapat disimpulkan)**. Ini menandakan bahwa telah terlaksana Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang.
7. SK 7. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 7 yaitu Sebesar **100 (Baik)**. Ini menandakan bahwa telah terlaksana kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif.
8. SK 8. Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Primadi ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 8 belum terealisasi.
9. SK 9. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal di ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 8 belum terealisasi.

Selama periode Triwulan I, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang disebabkan oleh adanya Efisiensi Anggaran dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut

1. Revisi 01 DIPA pada Sekretaris Utama Badan POM, tanggal 10 Februari 2025, berupa Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025.
2. Revisi 02 DIPA pada Sekretaris Utama Badan POM, tanggal 10 Februari 2025, tanggal 19 Februari 2025, berupa Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025.
3. Revisi 03 DIPA pada Sekretaris Utama Badan POM, tanggal 11 Maret 2025, berupa Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal untuk Pemenuhan Honorarium PPNPN TA.2025.
4. Revisi 04 DIPA pada Sekretaris Utama Badan POM, tanggal 25 Maret 2025, berupa Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA.2025.
5. Setelah mengalami revisi tersebut di atas, pada akhir triwulan I tahun 2025, DIPA BBPOM di Semarang masih sebesar Rp. 53.902.531.000,- dengan Blokir sebesar RP 28.409.946.000,- , anggaran Setelah dikurangi Blokir menjadi Rp. 25.492.585.000

Realisasi s.d 31 Maret 2025 yaitu sebesar Rp. 4.919.049.029,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau 19,30% , angka tersebut diatas dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 15%.

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Semarang disusun sebagai wujud penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan istilah Good Governance dan Clean Government. Laporan ini memberikan gambaran singkat namun lengkap mengenai pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2025, yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) pada periode tersebut.

Setiap triwulan, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun tantangan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disetujui oleh Kepala Balai Besar POM di Semarang. Tujuan utama laporan ini adalah untuk

mendukung pencapaian visi dan misi organisasi melalui penyampaian informasi kinerja yang terukur, serta menjelaskan pencapaian terhadap sasaran dan target yang telah ditetapkan. Proses penyusunan laporan ini sejalan dengan sistem yang ada, yang mencakup perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan, serta evaluasi dan review kinerja sesuai dengan prosedur pengendalian yang berlaku.

Balai Besar POM di Semarang juga telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan capaian kinerjanya. Salah satunya adalah Inovasi GUMREGAH Plus (Nggugah UMKM Resik Saking Bahan Berbahaya), yang berfokus pada makanan khas atau bahan pangan unggulan dari daerah agar terbebas dari bahan berbahaya dan aman dikonsumsi masyarakat. Inovasi ini juga mengutamakan strategi kolaborasi dengan melibatkan pihak swasta, masyarakat, lintas sektor, media, serta akademisi, dalam upaya mempercepat pengurangan penggunaan bahan berbahaya di pangan wilayah Jawa Tengah.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pencapaian kinerja Balai Besar POM di Semarang. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim yang bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 ini, yang berhasil menyelesaikan laporan tepat waktu.

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Semarang Tahun 2025 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja serta

memberikan informasi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami juga berharap laporan ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan kinerja berkelanjutan, berdasarkan rekomendasi yang ada, sehingga kinerja Balai Besar POM di Semarang dapat terus meningkat di masa yang akan datang.

Semarang, 30 April 2024

Kepala BBPOM di Semarang



Lintang Purba Jaya, S.Farm,Apt.,M.Si

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	7
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
A Analisis Lingkungan Strategis	13
1) Internal	13
2) Eksternal	17
3) Isu Strategis	17
Bab II	24
Perencanaan Kinerja	24
BAB III	33
Akuntabilitas Kinerja	33
SK 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	37
SK 2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	65
SK 3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	68
SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	72
SK 5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	82
SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	85
SK 7. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	89
SK 8. Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	91
SK 9. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	96
BAB IV	116
Penutup	116

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Tahun 2025 menandai dimulainya implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai tahap awal menuju visi Indonesia Emas 2045. RPJMN ini menekankan transformasi di berbagai bidang, termasuk penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan kesehatan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Salah satu prioritas nasional yang diamanatkan adalah peningkatan kualitas kesehatan dan perlindungan masyarakat melalui penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.

Dalam kerangka tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan pengawasan terhadap obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. BPOM bertanggung jawab memastikan seluruh produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat, serta melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Sejalan dengan prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, BPOM pada tahun 2025 memperkuat pelaksanaan tugas pokoknya melalui berbagai langkah strategis, antara lain: penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan, penetapan norma dan standar pengawasan, pelaksanaan pengawasan sebelum dan selama peredaran produk, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pengawasan obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga meningkatkan efektivitas pengelolaan dana operasional pengawasan melalui regulasi baru, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program prioritas pengawasan obat dan makanan.

Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang pada Triwulan I Tahun 2025 tidak hanya merupakan bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMN 2025-2029, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

2.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klarifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Semarang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dalam

melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, berkedudukan di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328, 7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, website www.pom.go.id

BBPOM di Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Dalam menjalankan fungsinya, BBPOM di Semarang mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana fungsi yang dijalankan meliputi:

FUNGSI BBPOM DI SEMARANG		
		8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan		9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan		10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian		11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
		

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan			12. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan			13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan			14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan		DLL	15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2023 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, terdapat 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu

1. Balai Besar POM di Semarang dengan cakupan Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang
2. Balai POM di Surakarta dengan cakupan Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri
3. Balai POM di Banyumas dengan cakupan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga

Dalam melaksanakan tugasnya, BBPOM di Semarang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Semarang disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (BBPOM di Semarang) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi BBPOM di Semarang per Januari 2024

Struktur organisasi BBPOM di Semarang terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Struktur Organisasi BBPOM di Semarang adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas antara lain:

melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;

- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja terdiri atas:

- a. ketua tim; dan
- b. anggota tim.

Ketua tim berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Isu Strategis BBPOM di Semarang Tahun 2025

BBPOM di Semarang memberikan dukungan terhadap kinerja Badan POM dan pembangunan di Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam upaya perlindungan masyarakat. Dalam menjaga masyarakat dari risiko obat dan makanan yang membahayakan kesehatan, BBPOM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan yang komprehensif mulai dari sebelum produk masuk pasar hingga kontrol pasca-pasar, yang dilengkapi dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas BBPOM di Semarang sebagai unit kerja pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugas agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dan efisien dalam mengontrol keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi BBPOM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu:

- a. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
- b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

c. Penguatan kapasitas kelembagaan BBPOM di Semarang

Strategi BBPOM di Semarang, antara lain:

1. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko
2. Penguatan pengelolaan SDM BBPOM di Semarang berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Semarang termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

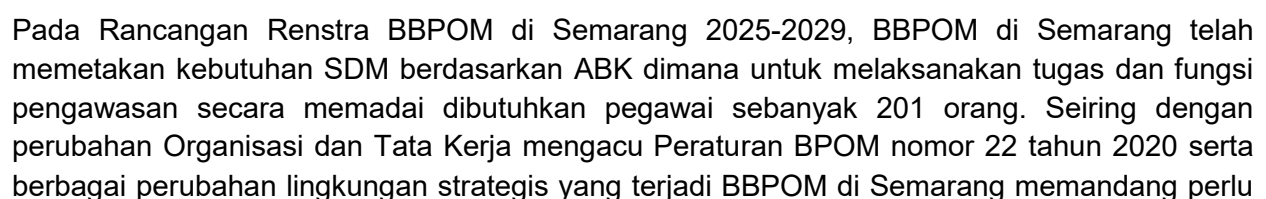
Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung lintas sektor terkait meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi.

A ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1) INTERNAL

BBPOM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)



menambah jumlah SDM dengan jenis kepegawaian PPPK sehingga dapat memberikan ruang bagi SDM professional untuk menjadi bagian dalam pengawasan obat dan makanan yang lebih baik. Pada tahun 2023 BBPOM di Semarang telah mengajukan usulan kebutuhan PPPK Tahun 2024 sejumlah 10 formasi dengan sebaran jabatan antara lain Pengawas Farmasi dan Makanan, Arsiparis, Pranata Komputer, Penata Layanan Operasional dan Pengelola Layanan Operasional. Untuk saat ini jumlah SDM BBPOM di Semarang per 28 April 2025 adalah 140 orang dengan persentase 19,42 % laki-laki serta 80,58 % perempuan. Terkait kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SDM BBPOM di Semarang, salah satu yang menjadi isu utama adalah upaya meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN yang pada tahun 2024 memperoleh angka 87,79. Penurunan nilai IP ASN BBPOM di Semarang dibandingkan tahun 2023 disebabkan terdapat perubahan cara perhitungan, utamanya pada dimensi kualifikasi yang memperhitungkan persyaratan jabatan dan dimensi kompetensi yang berdasarkan predikat kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi. Terkait hal tersebut, BBPOM di Semarang berupaya melakukan pemetaan pegawai yang masih memiliki potensi untuk dilakukan peningkatan nilai dimensi kualifikasi melalui peningkatan Pendidikan. Saat ini BBPOM di Semarang masih memiliki 18 orang pegawai dengan Pendidikan di bawah S1, atau secara persentase 12,86 % dari keseluruhan pegawai. Disamping itu juga peningkatan nilai dimensi kompetensi dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/ pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.

No	Jabatan	Jumlah SDM berdasar				Gap	
		ABK		ABK Bezzeting			
1	Kepala BBPOM di Semarang	1	Orang	1	Orang	0	Orang
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada BBPOM di Semarang	1	Orang	1	Orang	0	Orang
3	Pengawas Farmasi dan Makanan	161	Orang	116	Orang	45	Orang
4	Arsiparis	7	Orang	3	Orang	4	Orang
5	Pranata Komputer	6	Orang	2	Orang	4	Orang
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	3	Orang	1	Orang	2	Orang
7	Analisis Anggaran	1	Orang	0	Orang	1	Orang

8	Penata Laksana Barang	4	Orang	1	Orang	3	Orang
9	Perencana	6	Orang	1	Orang	5	Orang
10	Analisis SDM Aparatur	2	Orang	1	Orang	1	Orang
11	Pranata SDM Aparatur	2	Orang	1	Orang	1	Orang
12	Pranata Keuangan APBN	7	Orang	3	Orang	4	Orang
Total		201	Orang	129	Orang	72	Orang

b. Anggaran

Sumber anggaran pelaksanaan program/kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu Anggaran Tahun 2025 : Rp. 25.492.585.000,-

Realisasi anggaran s.d 31 Maret 2025 : Rp. 4.919.049.029,-

Persentase realisasi anggaran sebesar 19,30 % dari alokasi anggaran Tahun 2025

Peranan BBPOM di Semarang sebagai institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010, BBPOM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2025 sebesar : Rp. 959.000.000,-.

Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan BBPOM di Semarang kepada pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).

2) EKSTERNAL

Wilayah kerja BBPOM di Semarang, meliputi:



3) ISU STRATEGIS

Seiring perkembangan yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2025, beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Semarang, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki

Berdasarkan kebutuhan dengan perhitungan Beban Kerja Badan POM Tahun 2020-2024 diperoleh angka beban kerja (ABK) sebanyak 10.009 orang pegawai. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, dilakukan analisis beban kerja untuk mengetahui jenis jabatan dan jumlah pegawai yang diperlukan, termasuk gap (kekurangan) pegawai. Pengisian gap tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pengisian CPNS, PPPK, mutasi, kenaikan jabatan, dan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) agar jumlah SDM BBPOM di Semarang tersebut memadai secara kompetensi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Semarang harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BBPOM di Semarang perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, BBPOM di

Semarang juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta melakukan peningkatan soft competency untuk menghasilkan pribadi pegawai dan pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

BPOM telah mengembangkan aplikasi **IDEAS (Integrated Development and Training Information System)** yang merupakan platform pengembangan kompetensi digital yang terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id> yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara online kapanpun dan dimanapun, serta aplikasi SIMPHONI yang merupakan platform knowledge management di lingkungan BPOM. Kedua aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai secara mandiri.

Kekuatan SDM BBPOM di Semarang per 30 September 2024 adalah 141 orang, diantaranya masih terdapat 15% pegawai dengan jenjang pendidikan non sarjana. Berdasarkan pemetaan kebutuhan SDM berdasarkan ABK BBPOM di Semarang Tahun 2020-2024 dibutuhkan pegawai sebanyak 207 orang.

2. Regionalisasi Laboratorium

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada tahun 2022 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu 'Regionalisasi Laboratorium'. Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian kimia untuk obat dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, serta pengujian biologi. Beberapa laboratorium telah dilengkapi instrument dengan teknologi tinggi, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Beberapa BB/Balai POM memiliki fasilitas uji sterilitas dan atau fasilitas uji DNA, sehingga menjadi Balai unggulan BPOM untuk uji sterilitas dan uji DNA. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium pengujian. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam 7 region. Balai Besar POM di Semarang masuk ke dalam Region Semarang dengan Koordinator BBPOM di Semarang dan anggota terdiri dari Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Yogyakarta, Balai POM di Kota Surakarta, Loka POM di Kabupaten Bogor, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Manfaat dari system manajemen regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

3. Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Tengah

Pada tahun 2024, angka stunting di Jawa Tengah ditargetkan turun menjadi 14%. Sebelumnya, pada tahun 2023, angka stunting di provinsi ini berada di kisaran 17%, di 2022 angka stunting di provinsi ini berada di kisaran 20,9%. Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah bersama dengan BKKBN dan berbagai pihak melakukan berbagai intervensi, termasuk perbaikan gizi dan sanitasi, untuk mencapai target ini lebih cepat dari target nasional yang ditetapkan untuk tahun 2024. Sebanyak 20 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan angka stunting-nya yaitu Brebes, Purbalingga, Grobogan, Temanggung, Kabumen, Karanganyar, Magelang, Rembang, Purworejo, Sragen, Blora, Pekalongan, Wonogiri, Kota Pekalongan, Pati, Semarang, Batang, Kudus, dan Kota Magelang.

Angka stunting saat ini mencapai 17% persen, atau sekitar 540 ribu anak yang mengalami kondisi kerdil. Jawa Tengah menargetkan angka stunting (anak kerdil) menjadi 14 persen pada 2024. Untuk mencapai kondisi tersebut, Pemprov Jateng dan BKKBN membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang tersebar di 35 kabupaten/kota, 576 kecamatan, dan 8.562 desa/ kelurahan.

Besar POM di Semarang membantu mempercepat penurunan stunting dengan **Peningkatan Keamanan Pangan**. Salah satunya adalah dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan Kota Semarang dan Tim Penggerak PKK. Besar POM di Semarang melakukan edukasi kepada pedagang tentang pentingnya keamanan pangan dan melakukan uji cepat terhadap produk yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti formalin. Program ini juga melibatkan kader keamanan pangan dari TP PKK yang bertugas di tingkat RT/RW untuk memastikan pangan yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi. Memastikan akses terhadap pangan yang aman dan bergizi.

Kemudian **Pengawasan Produk Pangan**. Besar POM di Semarang melakukan pengawasan produk pangan dengan mengadakan uji cepat menggunakan rapid test kit untuk mendeteksi bahan berbahaya, seperti formalin, yang digunakan pada produk pangan seperti mie basah. Selain itu, mereka bekerja sama dengan kader keamanan pangan dan Dinas Kesehatan untuk memberikan edukasi kepada pedagang dan melakukan penilaian higienis serta sanitasi di tempat usaha pedagang guna memastikan bahwa produk pangan yang dijual aman untuk dikonsumsi.

Kemudian **Edukasi Publik**. Besar POM di Semarang melakukan edukasi publik bukan hanya dengan Komunikasi Informasi dan Edukasi tetapi juga dengan melibatkan kader keamanan pangan dari TP PKK dan memberikan pelatihan kepada mereka. Kader ini bertugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan dan cara mengidentifikasi bahan berbahaya pada produk pangan. Edukasi juga dilakukan melalui sosialisasi kepada para pedagang untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya kebersihan dan sanitasi dalam menjual produk makanan. Memberikan edukasi tentang pentingnya konsumsi makanan sehat dan bergizi untuk mencegah stunting.

Kemudian Program fortifikasi pangan merupakan salah satu strategi pemerintah meningkatkan akses pangan bergizi, dan hingga saat ini pemerintah telah menetapkan tiga pangan wajib fortifikasi, yaitu garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit.

Pengawasan pangan wajib fortifikasi tersebut melalui pre- dan post- market control. Pre-market control berfokus pada upaya pemenuhan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) di tingkat sarana produksi. Pengawasan terhadap jenis dan jumlah fortifikan yang ditambahkan, serta penilaian pemenuhan persyaratan mutu pada saat registrasi izin edarnya. Sedangkan, post-market control dilakukan dengan melakukan sampling dan pengujian produk di peredaran.

Penurunan prevalensi stunting pada balita masih merupakan agenda utama Pemerintah RI, major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. Penanganan permasalahan stunting bersifat multi-dimensional. Agar tepat sasaran, diperlukan upaya dan kontribusi lintas sektor yang konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas.

Sejalan dengan hal ini, Presiden telah menetapkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Sesuai perpres ini, upaya percepatan penurunan stunting dilakukan dalam bentuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Intervensi spesifik langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting, sedangkan intervensi sensitif menangani penyebab tidak langsung stunting melalui antara lain peningkatan akses pangan bergizi.

4. Dukungan UMKM

Pendampingan yang dilakukan Balai Besar POM di Semarang untuk UMKM Pangan Olahan sangat membantu dan mendukung untuk UMKM menaikkan grading yang lebih tinggi, dengan tujuan memperluas distribusi produk. Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dilakukan secara konsisten oleh Pelaku usaha UMKM. Meningkatkan pemahaman terkait proses Izin Penerapan CPPOB, Label Pangan Olahan sesuai ketentuan dan pendampingan proses daftar produk, yang sering dikeluh kesahkan terutama Pelaku Usaha UMKM. Selain sebagai pencapaian kinerja Balai Besar POM di Semarang, kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM pangan dan dapat memberikan bukti nyata dukungan bagi UMKM sehingga secara tidak langsung juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di era pemulihan ekonomi sekarang ini. Diharapkan pada tahun 2025, Balai Besar POM di Semarang dapat melakukan lebih banyak pendampingan terhadap produk-produk UMKM di provinsi Jawa Tengah

5. Penegakan hukum tindak pidana Obat dan Makanan Ilegal di Jawa Tengah

Tantangan kejahatan obat dan makanan yang semakin kompleks sebagai implikasi adanya perdagangan bebas. BBPOM di Semarang bersama lintas sektor terkait harus melangkah lebih maju untuk merespons dan mengantisipasi modus kejahatan yang semakin berkembang, terutama dengan banyaknya pelanggaran di bidang obat dan makanan secara online yang juga mengalami kenaikan. "Penegakan hukum kejahatan obat dan makanan yang optimal tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Oleh karenanya, upaya kolaboratif dengan strategi pendekatan mutual adjustment antara

BPOM dan criminal justice system (CJS) perlu diperkuat dalam mengantisipasi dan merespons perkembangan modus kejahatan obat dan makanan.

”Beberapa bentuk sinergi Balai Besar POM di Semarang dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam hal ini Direskrimsus dan Diresnarkoba membantu POLRI dalam memberikan keterangan ahli, bantuan pemeriksaan laboratorium, pengawasan serta penertiban obat dan makanan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Psikotropika dan Undang-Undang Narkotika”

6. Meningkatnya Peredaran Terkait Penjualan Obat dan Makanan yang Berisiko terhadap Kesehatan Secara Online

Meskipun dasar hukum terkait peredaran obat dan makanan sudah diatur oleh pemerintah salah satunya melalui “UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan” dan “Peraturan BPOM No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian” tetapi peredaran obat dan makanan secara online masih saja tumbuh dengan pesatnya, hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hasilnya sebanyak 43% dari keseluruhan usaha e-commerce merupakan kelompok makanan dan 5% Kosmetik dan Obat-Obatan.

Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. BBPOM di Semarang terus berkomitmen untuk memberantas peredaran obat dan makanan ilegal khususnya di wilayah Jawa Tengah dengan lebih dari 120 subsite, atau website, maupun marketplace yang telah di take down dalam 1 tahun berjalan.

BPOM sangat mendukung keberlangsungan usaha obat dan makanan di Indonesia dan berkomitmen untuk melakukan pengawasan berimbang dengan mendorong pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, baik melalui pendampingan/pembinaan maupun fasilitasi kemudahan berusaha. Di sisi lain, BPOM tidak segan bertindak tegas menegakkan hukum dan aturan terhadap pelaku usaha yang sengaja melanggar regulasi dan melakukan kejahatan obat dan makanan.

7. GERMAS SAPA di Provinsi Jawa Tengah

Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) merupakan aksi nasional berbasis komunitas melalui strategi intervensi dari sisi supply maupun demand yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman.

Program GERMAS SAPA di Jawa Tengah ini merupakan Program yang komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan merupakan gabungan dari Gerakan Keamanan Pangan Desa/kelurahan,

Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Masing-masing program memiliki segmen target komunitas yang spesifik, tetapi secara keseluruhan ketiganya bermuara pada terwujudnya peningkatan pola hidup sehat masyarakat Jawa Tengah dalam memproduksi, menyediakan dan mengonsumsi pangan yang aman.

Badan POM telah menginisiasi program ini sebagai dukungan terhadap Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sejak tahun 2017. Diharapkan dengan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat luas dapat menapis permasalahan klasik di bidang Keamanan Pangan seperti :

- a. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terutama Industri Rumah Tangga Pangan tentang Aspek Higiene dan Sanitasi dalam proses produksi.
- b. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan melebihi batas
- c. Penyalahgunaan Bahan Berbahaya dalam pangan
- d. Masalah pencemaran lingkungan termasuk cemaran air

8. Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) menuju keadilan dan kesetaraan

Definisi gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan (rekayasa) sosial dan budaya, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Beragam stereotype terhadap perempuan dan laki-laki yang berkembang di masyarakat seperti laki-laki dikenal lebih rasional, kuat, agresif dan tegas sedangkan wanita bersifat emosional, ragu-ragu, pasif, lemah.

Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender.

Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Upaya mencapai kehidupan yang lebih baik dilakukan secara terus menerus oleh Pemerintah dengan pembangunan kualitas hidup masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung pada peran serta seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

9. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Melalui Sinergisme Pengawasan di Tingkat Pusat dan Daerah

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 terbit atas dasar maraknya peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat serta belum optimalnya pengawasan obat dan makanan di Indonesia yang dikarenakan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Pada Inpres tersebut, Presiden RI memberikan instruksi kepada 12 K/L/D untuk bersinergi satu sama lain dan berkontribusi dalam peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan sesuai dengan tupoksi masing-masing dimana Badan POM sebagai koordinator teknis pelaksanaan pengawasan.

Dilatarbelakangi Inpres 3 Tahun 2017, Presiden juga menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, sehingga Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah dengan mengangkat substansi di dalam Inpres 3 Tahun 2017 ke dalam bentuk produk hukum berupa Peraturan Menteri.

Terkait dengan pengawalan Inpres No. 3 tahun 2017, Badan POM perlu melakukan pengawalan implementasi dimana salah satunya adalah adanya penguatan peran pemerintah daerah. Sebagaimana amanah UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana beberapa peran yang mendukung efektivitas pengawasan fungsi terletak di pemerintah daerah. Dalam upaya pengawasaan fungsi tersebut, Badan POM telah mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk pengawasan di Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

3.1 Rancangan Rencana Strategis 2025-2029

Perencanaan kinerja satuan kerja terdapat dalam Dokumen Rancangan Rencana Strategis. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan satuan kerja. Untuk periode tahun 2025-2029, dokumen Rancangan Renstra Badan POM sudah dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra BBPOM di Semarang tahun 2025-2029.

3.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

RKT 2025 disusun di tahun 2024 mengacu rancangan awal Renstra BBPOM di Semarang tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025
a	b	c	d
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja BBPOM di Semarang	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79,7
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95,6
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025
a	b	c	d
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	82
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	14
10	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,5
		Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82,49
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	90
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,7

3.3 Perjanjian Kinerja 2025

Setelah DIPA BBPOM di Semarang Tahun 2025 disahkan, BBPOM di Semarang menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 adalah dengan mengacu pada Renja Badan POM Tahun 2025 sesuai aplikasi KRISNA dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2025 yang telah disahkan.

Pada penyusunan PK 2025 penetapan target dimutakhirkan dengan Renstra BBPOM di Semarang tahun 2025-2029 dan hasil kinerja 2024, maka terdapat beberapa perubahan Sasaran Kegiatan, IKU maupun targetnya.

Secara rinci, perubahan target Perjanjian Kinerja Balai Besar POM Tahun 2025 tersaji dalam tabel berikut :

No	Sasaran Kegiatan	IKU		Target 2025
a	b	c	d	e
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	IK 1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00
2		IK 2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
3		IK 3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
4		IK 4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
5		IK 5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
6	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	IK 6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86

No	Sasaran Kegiatan	IKU		Target 2025
a	b	c	d	e
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IK 7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,5
8		IK 8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
9		IK 9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	72,25
10		IK 10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
11		IK 11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,87
12	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IK 12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54
13	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja BBPOM di Semarang	IK 13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79,7
14	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	IK 14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,42
15		IK 15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20
16		IK 16	Jumlah desa pangan aman	6
17		IK 17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
18	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IK 18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	83,7
19	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	IK 19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
20	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	IK 20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
21	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	IK 21	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,7
22	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	IK 22	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43
23		IK 23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82
24		IK 24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	91,02
25		IK 25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,6

3.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

BBPOM di Semarang juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan triwulanan beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang tahun 2025 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran pada Laporan Kinerja Interim ini

Tabel 1 RAPK BBPOM di Semarang 2025

Sasaran Strategis		Indikator		Target Bulanan 2025												Anggaran	
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87,00	1.185.442.000	
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO													26	80.300.000
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		208.979.667
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		208.979.667
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		208.979.666
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	53	56	59	63	66	69	73	76	79	83	86	65.855.250	
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	65.855.250	
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		65.855.250
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75	96,75		650.500.000
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		650.500.000
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87		65.855.250
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5,61	16,82	28,04	39,25	50,47	54	54	54	54	54	54	88.195.000	
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			70,31	70,31	70,31	72,87	72,87	72,87	76,12	76,12	76,12	79,7	9.630.584.000	
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86,42	86,42	86,42	86,42	86,42	86,42	86,42	86,42	86,42		17.055.022.000	
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5%	20%	20%	60%	60%	60%	65%	70%	75%	85%	95%	20	653.579.000	
		16	Jumlah desa pangan aman	5%	25%	28%	46%	54%	62%	71%	73%	77%	88%	100%	6	1.308.912.000	
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5%	20%	20%	40%	65%	65%	95%	100%	100%	100%	100%	1	130.777.000	
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik daOtau IP CPPOB pangan olahan	6,67	16	24,17	48,5	56,67	69,33	82,5	84,33	88,33	91	96,67	91	97.721.000	
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	25	35	37,5	40	45	55	60	65	75	80	85	813.876.000	
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	122.167.000	

Sasaran Strategis		Indikator		Target Bulanan 2025												Anggaran	
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
10	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	21	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang													4,70	688.354.000
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang													92,43	240.000.000
		23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang													82	240.000.000
		24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang													91,02	19.136.242.000
		25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang													3,6	240.000.000
Total Anggaran																	53.902.531.000

3.5 Nilai Kinerja Organisasi

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi dari setiap indikator sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Formula menghitung NPSK:

$$\text{NPSK} = \frac{\sum \text{Capaian IKU}}{\sum \text{IKU}}$$

Surat Edaran Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Capaian Indikator Kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- (1) Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- (2) Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

Jenis Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

b) NKO tahunan NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

(1) Capaian Perjanjian Kinerja Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Formula menghitung NKO:

$$NKO = \sum NPSK / \sum SK$$

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$> 100 \%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - < 100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$).	

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Semarang adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Semarang yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Semarang menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Semarang
3. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada data base *online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai

4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, monev Bappenas dan pada aplikasi *e-performace*.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC). Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi Simakin pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level pimpinan eselon 2 hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

Selain dilakukan pengukuran indikator kinerja, juga dilakukan pengukuran efisiensi kinerja. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ CapaianOutput}}{\% \text{ RencanaCapaianInput}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 4 Range Tingkat Efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Triwulan (TW) I

Capaian Kinerja merupakan proses pengukuran kinerja yang dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Capaian Kinerja BBPOM di Semarang TW I Tahun 2025 diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan Tahun 2025.

Tabel 2 Perbandingan Realisasi TW I Dengan Target Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	88,02	101,17	 Tercapai/ Melampaui
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	-	-	-
	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	93,2	109,65	 Tercapai/ Melampaui
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	-	-	-
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100	125,00	 Tercapai/ Melampaui
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86,00	60,82	70,72	 Akan Tercapai
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	90,29	100,32	 Tercapai/ Melampaui
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	-	-	-
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75	-	-	-
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	100	125,00	 Tercapai/ Melampaui
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,87	99,52	115,90	 Tercapai/ Melampaui
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54,00	15,89	29,43	 Perlu Upaya Keras

Sasaran Kegiatan	No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54,00	15,89	29,43	Perlu Upaya Keras
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Semarang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79,70	82,4	103,39	Tercapai/ Melampaui
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	90,25	104,43	Tercapai/ Melampaui
	15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20,00	0,25	25,00	Perlu Upaya Keras
	16	Jumlah desa pangan aman	6,00	0,25	25,00	Perlu Upaya Keras
	17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	0,25	25,00	Perlu Upaya Keras
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91,00	28,33	31,13	Perlu Upaya Keras
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	85,00	39	45,88	Perlu Upaya Keras
Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	50	55,56	Perlu Upaya Keras
Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	21	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,70	-	-	-
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43	-	-	-
	23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82,00	-	-	-
	24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	91,02	-	-	-
	25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,60	-	-	-

Melihat perbandingan Realisasi TW I dengan target tahun 2025 terdapat 8 (delapan) indikator yang sudah tercapai/ melampaui, 1 (satu) Indikator akan tercapai targetnya dan 7 (Tujuh) masih perlu kerja keras.

Tabel 3 Data Capaian Nilai Kinerja BBPOM di Semarang

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR	Target 2025	TWI			
					Target	Realisasi	Capaian	NPSK
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	87	88,02	101,17	107,11
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26				
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	93,20	109,65	
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar <i>(Tidak Masuk dalam Perhitungan NKO)</i>	100	100			
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125,00	
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	56	60,82	108,61	
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90,29	100,32	
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan <i>(Tidak Masuk dalam Perhitungan)</i>	85	85			
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan <i>(Tidak Masuk dalam Perhitungan NKO)</i>	96,75	96,75			
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125,00	
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,87	85,87	99,52	115,90	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54	16,82	15,89	94,47	94,47
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Semarang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79,7	70,31	82,40	117,20	110,00
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	86,42	90,25	104,43	103,43
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	20%	25%	125,00	
		16	Jumlah desa pangan aman	6	28%	25%	89,29	
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	20%	25%	125,00	
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB	91	24,17	28,33	117,21	110,00

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR	Target 2025	TW I			
					Target	Realisasi	Capaian	NPSK
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	85	35	39	111,43 	110,00
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100,00 	100,00
8	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	21	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,70				
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43				
		23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82				
		24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	91,02				
		25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,6				
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)							105,00 	
							Istimewa	

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BBPOM di Semarang TW I tahun 2025 sebesar **105 (Istimewa)**.

Selama TW I ini BBPOM di Semarang telah berupaya keras untuk mencapai kinerja meski dalam kondisi efisiensi anggaran. Untuk lebih mendetail akan dijelaskan pada subbab berikut.

SK 1. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN PRODUK SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI SEMARANG

Tabel Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 1

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	88,02	101,17
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO			
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93,20	109,65
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar <i>(Tidak Masuk dalam Perhitungan NKO)</i>	100		
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	56	60,82	108,61
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90,29	100,32
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan <i>(Tidak Masuk dalam Perhitungan NKO)</i>	85		
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan <i>(Tidak Masuk dalam Perhitungan NKO)</i>	96,75		
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,87	99,52	115,90
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)					107,11

SK 1.Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang di ukur dengan 11 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 yaitu Sebesar **107,11 (Tidak dapat disimpulkan)**. Dari 11 IKU terdapat 4 iku tercapai dengan sangat baik, 3 IKU tidak dapat disimpulkan, 1 IKU di ukur di akhir tahun, dan 3 IKU tidak diukur karena di *exclude* dari perhitungan NPSS. Ini

mendakan bahwa BBPOM Semarang telah efektif dalam mengawasi produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerjanya.

IKU 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan rata-rata dari persentase obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dari :

- a. Kesesuaian Perencanaan Sampling yang mencakup kesesuaian dengan target sampel, renlak kategori sampel dan renlak kelas terapi
- b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling yang mencakup kesesuaian dengan renlak periode/waktu sampling, ketentuan Evaluasi Penandaan, diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara rapid.
- c. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian yang mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir (kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian) dan waktu pelaporan sesuai pedoman sampling
- d. Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan Obat

Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dari :

- a. Pemenuhan target pengawasan OBA
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
- d. Kesesuaian parameter uji
- e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dari :

- a. Pemenuhan target pengawasan SK

- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
- d. Kesesuaian parameter uji
- e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan
- f. Tanggapan atas surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dari :

- a. Pemenuhan target pengawasan
- b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling
- c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan, mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu SLA Sampling, SLA Pengujian dan SLA Pelaporan
- d. Ketepatan dalam penentuan Kesimpulan, mencakup penentuan Kesimpulan Penandaan, Pengujian, Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik, mencakup surat Edaran pembersihan pasar dan Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Kegiatan sampling, pemeriksaan penandaan, pengujian dan monitoring produk recall dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dalam rangka menjamin produk/sediaan farmasi yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu.

▪ Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025

Tabel ... Realisasi Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
				101,17
				Sangat Baik

Pada TW 1 telah dilakukan sampling dan pengujian sediaan farmasi sejumlah 205 sampel yang meliputi 49 sampel obat, 46 sampel obat bahan alam, 10 sampel suplemen kesehatan dan 100 sampel kosmetik. Realisasi IKU sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW 1 sebesar 88,02 % dari target IKU sebesar 87%, sehingga capaian IKU pada TW 1 sebesar 101,17 % dengan kategori Sangat Baik.

▪ Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
					

Realisasi IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW 1 (88,02%) melampaui target IKU tahun 2025 (87%) dengan capaian sebesar 101,17%.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan hingga TW I adalah :

- Semua petugas sampling sediaan farmasi telah mengikuti E-Learning Pelatihan Sampling dan Pengujian sesuai komoditi yang disampling (obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik), sehingga pelaksanaan sampling dapat dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Sampling.
- Koordinasi yang baik dan intensif baik internal maupun eksternal dengan Unit Pengampu dan anggota Regionalisasi Laboratorium Semarang (BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Bandung, BBPOM di Jakarta, BBPOM di Serang) terkait renlak sampling.
- Koordinasi yang baik dan intensif dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, BKKBN Provinsi Jateng, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Gudang Alat Kontrasepsi Kabupaten/Kota) terkait pengambilan sampel obat JKN dan obat program pemerintah.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

- Meningkatkan koordinasi yang baik dan intensif baik internal maupun eksternal dengan Unit Pengampu dan anggota Regionalisasi Laboratorium Semarang (BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Bandung, BBPOM di Jakarta, BBPOM di Serang) terkait renlak sampling
- Meningkatkan koordinasi yang baik dan intensif dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, BKKBN Provinsi Jateng, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Gudang Alat Kontrasepsi Kabupaten/Kota) terkait pengambilan sampel obat JKN, obat program pemerintah dan vaksin.
- Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
		1.185.442.000	59.341.047	5,01		

Realisasi anggaran pada TW 1 hanya mencapai 5,01% dari pagu anggaran tahun 2025, sehingga tingkat efisiensi anggaran tidak efisien. Hal ini disebabkan pada TW 1 terdapat blokir/efisiensi anggaran sampling dan pengujian sehingga jumlah sampel menyesuaikan

anggaran yang ada. Sampel sediaan farmasi pada TW 1 hanya sejumlah 205 sampel (13,74%) dari target sampel tahun 2025 sebesar 1492 sampel.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- a. Kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi mendukung IKU sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada poin pemantauan produk/sediaan farmasi yang direcall Badan POM.
- b. Kegiatan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi mendukung IKU sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada poin tanggapan atas surat Tindak Lanjut yang dikeluarkan oleh Unit Pengampu.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian agar sesuai dengan target IKU dengan anggaran yang efisien.

IKU 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dihitung berdasarkan jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh BBPOM di Semarang pada tahun 2025.

Tujuan intervensi berupa KIE Farmakovigilans kepada tenaga kesehatan/ tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pemahaman pentingnya pemantauan dan pelaporan KTD/ ESO.

Tahapan pelaksanaan KIE Farmakovigilans berdasarkan petunjuk pelaksanaan KIE Farmakovigilans Kepada Tenaga Kesehatan/ Tenaga Medis di Fasyankes oleh UPT Pelaksana Teknis BPOM.

Intervensi utama dilakukan melalui KIE Farmakovigilans kepada tenaga kesehatan/tenaga medis di fasyankes oleh BBPOM di Semarang. Fasyankes mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik sesuai wilayah kerja UPT BPOM yang belum melaporkan KTD/ESO ke BPOM dan Tenaga kesehatan/tenaga medis mencakup dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan dan tenaga kesehatan/tenaga medis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KIE dilakukan kepada sarana pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman, pengetahuan dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis terkait farmakovigilans dan menyamakan persepsi mengenai pentingnya pelaporan efek samping obat yang berkualitas dalam rangka pengawalan keamanan obat untuk menjamin keselamatan pasien; meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO di Indonesia untuk mendukung tercapainya profil keamanan obat beredar yang mencakup populasi di Indonesia dan meningkatkan keamanan penggunaan obat untuk mendukung keselamatan pasien dan kesehatan masyarakat secara luas.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025**

Tabel ... Realisasi Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

No.	IKU	Target TWI	Realisasi	Capaian (%)

KIE Farmakovigilans dilakukan kepada 90 sarana pelayanan kesehatan secara daring mencakup 55 rumah sakit, 29 Puskesmas dan 6 klinik di 11 Kabupaten/Kota yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Boyolali, Kota Salatiga, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Grobogan yang diselenggarakan pada tanggal 4 Februari 2025. Sampai akhir TW I tahun 2025 realisasi kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ES 13,3%, tahapan yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan monitoring pelaporan KTD/ESO melalui website e-meso.pom.go.id dan melakukan pendampingan secara online melalui (whatsapp) kepada sarana pelayanan kesehatan (saryankes) yang belum melaporkan KTD/ESO melalui e-meso.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.**

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi

Realisasi jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM belum mencapai target 26% (24 sarana), sampai TW.1 Tahun 2025 sebesar 13,3% yaitu ada 12 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang sudah melaporkan e-meso yang terdiri dari 11 rumah sakit dan 1 klinik. Hal ini terjadi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga pencapaiannya baru dapat tercapai di akhir Tahun 2025.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO adalah:

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan KTD/ ESO.
- Mendorong komitmen sarana pelayanan kesehatan yang telah diberikan KIE Farmakovigilans.
- Pendampingan yang dilakukan secara terus menerus kepada sarana pelayanan kesehatan yang telah diberikan KIE Farmakovigilans.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Dalam rangka melakukan perluasan cakupan sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO yang telah mendapatkan KIE Farmakovigilans maka BBPOM Semarang akan melakukan refreshment pentingnya farmakovigilans dan cara pelaporan KTD/ESO serta membuat surat permintaan secara resmi kepada Direktur/ Kepala/ Pimpinan rumah sakit,

puskesmas dan klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans namun belum melaporkan KTD/ ESO.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
		80.300.000	10.264.700	12,78		

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien. Capaian indikator 12,78% karena penyelenggaraan KIE dan pendampingan dilakukan secara Daring. Setiap tahapan program dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- Pendampingan terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh BBPOM Di Semarang secara intensif.
- Peran serta lintas sektor dalam hal ini Dinas Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota yang ikut serta dalam pendampingan pelaporan KTD/ESO.

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan IKU baru di tahun 2025 sehingga belum ada pemanfaatan dari Laporan Kinerja.

IKU 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan Kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya, antara lain : Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa, Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi, Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS, Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS.

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dari Kesesuaian Target Sampel, Kesesuaian Parameter Uji, Ketepatan Pengambilan Kesimpulan, Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel, Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian, serta Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Kegiatan sampling pangan olahan, pemeriksaan penandaan, pengujian dan tindak lanjut produk TMS dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan dalam rangka menjamin produk pangan olahan yang beredar aman dan bermutu.

▪ Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025

Tabel ... Realisasi Kinerja **Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
				109,65
				Sangat Baik

Pada TW 1 telah dilakukan sampling dan pengujian pangan olahan sejumlah 40 sampel yang terdiri dari pangan fortifikasi 3 sampel dan pangan olahan (bukan fortifikasi) 37 sampel. Realisasi IKU sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW 1 sebesar 93,2 % dari target IKU sebesar 85%, sehingga capaian IKU pada TW 1 sebesar 109,65 % dengan kategori Sangat Baik.

▪ Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
					

Realisasi IKU Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW 1 (93,20%) melampaui target IKU tahun 2025 (85%) dengan capaian sebesar 109,65%.

▪ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Upaya yang dilakukan BPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan kinerja Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan hingga TW I adalah :

- Semua petugas sampling pangan olahan telah mengikuti E-Learning Pelatihan Sampling dan Pengujian Pangan Olahan, sehingga pelaksanaan sampling dapat dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Sampling.
- Koordinasi yang baik dan intensif baik internal maupun eksternal dengan Unit Pengampu terkait renlak sampling.
- Koordinasi yang baik dan intensif dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) terkait sampling pangan olahan penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian.

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**
 - a. Meningkatkan koordinasi yang baik dan intensif baik internal maupun eksternal dengan Unit Pengampu terkait renlak sampling.
 - b. Meningkatkan koordinasi yang baik dan intensif dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) terkait sampling pangan olahan penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan.
 - c. Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian.
- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
		208.979.667	23.820.186	11,40		

Realisasi anggaran pada TW 1 hanya mencapai 11,40% dari pagu anggaran tahun 2025, sehingga tingkat efisiensi anggaran tidak efisien. Hal ini disebabkan pada TW 1 terdapat blokir/efisiensi anggaran sampling dan pengujian sehingga jumlah sampel menyesuaikan anggaran yang ada. Sampel pangan olahan pada TW 1 hanya sejumlah 40 sampel (6,22%) dari target sampel tahun 2025 sebesar 643 sampel. Capaian jumlah sampel pangan olahan sangat kecil dikarenakan pada TW 1 kegiatan sampling pangan difokuskan pada pemenuhan target sampel Pangan Industri Rumah Tangga yang hanya dilakukan pada TW 1.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
 - a. Kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan mendukung IKU sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada poin tindak lanjut terhadap produk TMS. Produk TMS di sarana distribusi pangan olahan ditindaklanjuti sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut.
 - b. Kegiatan pengawasan sarana produksi pangan olahan mendukung IKU sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada poin tindak lanjut terhadap produk TMS.
 - c. Kegiatan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi mendukung IKU sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada poin tindak lanjut terhadap produk TMS.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian agar sesuai dengan target IKU dengan anggaran yang efisien.

IKU 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar (tidak masuk dalam perhitungan NPSS)

Sampel KLB keracunan pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan yang berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/ atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB keracunan pangan berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

KLB keracunan pangan bersifat insidental dan tidak terprediksi sehingga diperlukan koordinasi yang baik dan intensif antar lintas sektor termasuk dalam penentuan parameter pengujian dan proses pengujian sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025**

Tabel ... Realisasi Kinerja **Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar**

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100		

KLB keracunan pangan bersifat insidental sehingga tidak selalu ada kasus dan sampel setiap bulannya. Pada TW 1 terdapat 2 sampel KLB keracunan pangan, yaitu pada bulan Januari sebanyak 1 sampel dan Februari 1 sampel. Telah dilakukan pengujian terhadap ke-2 sampel tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan hasil sampel bulan Januari Tidak Memenuhi Syarat (pengawet dan pemanis) dan sampel bulan Februari hasilnya Memenuhi Syarat (uji logam berat dan mikro). Dengan demikian persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada TW 1 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.**

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100			

Realisasi persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada TW 1 sesuai dengan target Tahun 2025 sebesar 100%. Akan terus dilakukan upaya sehingga realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**
Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar hingga TW 1 adalah :

- a. Meningkatkan koordinasi yang baik dan intensif dengan lintas sektor khususnya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Provinsi terkait kejadian KLB keracunan pangan.
- b. Meningkatkan koordinasi di dalam internal BBPOM di Semarang dan dengan pusat Badan POM terkait kejadian KLB keracunan pangan.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam penetapan parameter uji dan pelaksanaan pengujian sehingga sampel KLB keracunan pangan diuji sesuai standar yang telah ditetapkan.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Dalam rangka meningkatkan kinerja selanjutnya akan dilakukan upaya :

1. Secara berkelanjutan meningkatkan koordinasi yang baik dan intensif baik dengan lintas sektor, dengan pusat dan di dalam internal BBPOM di Semarang terkait kejadian KLB keracunan pangan.
2. Monitoring dan evaluasi dalam penetapan parameter uji dan pelaksanaan pengujian sehingga sampel KLB keracunan pangan diuji sesuai standar yang telah ditetapkan.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	208.979.667	23.820.186	11,40		

Pada awal tahun atau TW 1 diberlakukan kebijakan efisiensi anggaran. Penggunaan sumber daya berupa anggaran untuk m-“encapai kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 11,40% dari Pagu Anggaran yang disediakan.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian kinerja persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar antara lain :

- a. Menetapkan tim KLB keracunan pangan dalam Surat Keputusan (SK) dilengkapi dengan tupoksi masing-masing.
- b. Menetapkan koordinator KLB yang bertugas untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal (Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota/ Provinsi dan Badan POM) sehingga koordinasi dapat berlangsung cepat.
- c. Pemanfaatan secara optimal aplikasi pelaporan KLB keracunan pangan, yaitu SPIMKER.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam penetapan parameter uji dan pelaksanaan pengujian sehingga sampel KLB keracunan pangan diuji sesuai standar yang telah ditetapkan.

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 maka dilakukan pemanfaatan informasi untuk meningkatkan capaian kinerja dengan cara meningkatkan koordinasi yang baik dan intensif

baik dengan lintas sektor, dengan pusat dan di dalam internal BBPOM di Semarang serta monitoring dan evaluasi dalam penetapan parameter uji dan pelaksanaan pengujian sehingga sampel KLB keracunan pangan diuji sesuai standar yang telah ditetapkan.

IKU 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kategori pangan PIRT yang disampling mengacu pada peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang terdiri dari 11 kategori pangan. Penetapan proporsi per kategori target pangan PIRT yang disampling ditentukan dengan *risk based* berdasarkan beberapa aspek seperti PIRT yang beredar, potensi risiko untuk produk asal hewan dan ikan, Riwayat temuan produk tidak memenuhi syarat, produk yang berpotensi dengan BTP maksimal level, potensi penggunaan bahan berbahaya/ bahan tidak diizinkan pada pangan, dan potensi terhadap target konsumen tertentu. Selanjutnya jumlah dan kategori sampel pangan PIRT yang disampling sesuai dengan prioritas sampling yang telah ditetapkan dan disepakati. Pengambilan sampel pangan PIRT dilakukan dari peredaran atau sarana distribusi pangan yang ada pada wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang. Jadwal sampling PIRT oleh UPT BPOM dilakukan pada TW I tahun berjalan agar tidak terjadi sampling berulang pada produk yang sama dengan Dinas Kesehatan.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung berdasarkan rumus = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

dimana A adalah kesesuaian target PIRT yang diperoleh dari : $(A1 + A2) / 2$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

B adalah kesesuaian parameter uji yang dihitung dari : (Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C adalah ketepatan pengambilan sampel yang dihitung dari : (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D adalah ketepatan waktu pengambilan sampel dihitung dari : (Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

E adalah ketepatan waktu pelaporan dihitung dari (Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F adalah tindak lanjut sampel PIRT dihitung dari : (Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025

Tabel ... Realisasi Kinerja **Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00
				Tidak dapat disimpulkan

Target sampel PIRT selama pada tahun 2025 sejumlah 56 sampel. Sampai dengan akhir triwulan I, sampel PIRT yang diperiksa dan diuji sejumlah 32 sampel. Hal ini disebabkan

karena adanya efisiensi anggaran sehingga BBPOM di Semarang menyesuaikan jumlah sampel dengan ketersediaan reagen yang ada di laboratorium pengujian kimia dan mikrobiologi.

Berdasarkan jumlah sampel yang telah diperiksa dan diuji pada TW I (32 sampel) maka dapat dihitung jumlah persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan menghitung nilai A,B,C, D,E, dan F.

Nilai A sebesar 100% yang diperoleh dengan membagi dua (2) jumlah nilai A1 dan A2. Sampel PIRT yang diperiksa sesuai pedoman sampling pada TW I sejumlah 32 sampel telah diuji seluruhnya sesuai dengan pedoman sampling.

Nilai B sebesar 100% karena 32 sampel yang diperiksa pada TW I diuji sesuai parameter uji dibagi dengan jumlah sampel pada TW I.

Nilai C sebesar 100% karena 32 sampel telah diambil kesimpulan sesuai dengan pedoman sampling dan telah diperiksa dan diuji.

Nilai D sebesar 100% diperoleh dengan membandingkan jumlah sampel yang disampling pada TW I (32 sampel) dibagi dengan jumlah sampel pada TW I (32 sampel).

Nilai E sebesar 100% karena seluruh sampel pada TW I (32 sampel) telah dilaporkan melalui SIPT sebelum tanggal 15 bulan berikutnya dibagi dengan jumlah sampel pada TW I.

Nilai F sebesar 100% karena 6 sampel tindak memenuhi syarat seluruhnya telah ditindaklanjuti melalui surat dinas kepada pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan perhitungan tersebut maka realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%. Target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 125% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

▪ Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	 Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan realisasi dan target maka capaian persentase sampel PIRT berisiko ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai TW I sebesar 125% telah tercapai dan terlampaui.

Namun demikian jumlah sampel yang telah diperiksa belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2025 yaitu sejumlah 56 sampel. Sehingga terdapat 24 sampel yang harus diperiksa dan diuji sesuai ketentuan pada TW 2 berikutnya.

▪ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Adanya efisiensi anggaran menyebabkan kegiatan pemeriksaan sampel PIRT tidak dapat diselesaikan pada TW I. Namun demikian Balai Besar POM di Semarang telah melakukan upaya untuk mendukung kegiatan sampling PIRT pada TW I, seperti :

- d. Koordinasi internal Balai Besar POM di Semarang untuk menyesuaikan jumlah sampel sesuai dengan ketersediaan reagen yang ada sesuai pedoman sampling.
- e. Melakukan koordinasi dengan Badan POM untuk menyesuaikan jumlah sampel dan pengujian sesuai dengan anggaran efisiensi yang ada.

- f. Koordinasi dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan Kudus, Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan Balai POM di Banyumas) terkait 6 (enam) sampel PIRT dengan hasil uji tidak memenuhi syarat agar melakukan pembinaan kepada sarana IRTTP (Industri Rumah Tangga Pangan).
- g. Pengawasan terhadap hasil pembinaan/ feedback surat tindak lanjut terkait hasil uji sampel PIRT tidak memenuhi syarat dari Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten serta lintas sektor terkait.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Dengan adanya relaksasi anggaran pada TW II akan dilakukan pemeriksaan dan pengujian sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling dengan jumlah target sampel seperti yang ditetapkan pada awal tahun 2025 yaitu sebesar 56 sampel.

Jumlah sampel PIRT yang belum disampling pada TW I sejumlah 24 sampel akan diperiksa dan diuji sesuai dengan ketentuan pada triwulan II selanjutnya.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	208.979.666	23.820.186	11,40	125,000	Tidak Efisien

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa penggunaan anggaran tidak efisien. Capaian IKU 125% sedangkan realisasi anggaran 11,40%. Program sampling PIRT menggunakan anggaran yang sama dengan sampel pangan olahan. Jumlah sampel PIRT adalah 8% dari jumlah sampel pangan olahan secara keseluruhan. Selain itu adanya efisiensi anggaran pada TW I menyebabkan pelaksanaan program tidak sesuai perencanaan awal sehingga serapan anggaran menjadi rendah.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- e. Perbandingan antara realisasi dan target tidak seimbang. Target tahunan yang ditetapkan 80% sehingga apabila realisasi sebesar 100% maka capaian kinerja menjadi 125% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.
- f. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan keterbatasan anggaran untuk pembelian sampel dan reagen sehingga harus dilakukan penyesuaian jumlah sampel sesuai sumber daya yang ada yang pada akhirnya menyebabkan penyelesaian kegiatan sampling PIRT tidak selesai pada TW I seperti yang ditargetkan pada awal tahun sesuai pedoman sampling.
- g. Relaksasi anggaran pada TW II akan mampu meningkatkan realisasi jumlah sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai dengan target awal tahun yang ditetapkan.

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

- Berdasarkan laporan kinerja, pada TW I dilakukan efisiensi anggaran sehingga dilakukan koordinasi dan excersice sesuai dengan efisiensi anggaran yang ada. Namun demikian

pada akhir TW I pemerintah menetapkan relaksasi anggaran termasuk sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai pedoman sehingga pada TW 2 dilakukan sampling PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai pedoman untuk mencapai jumlah target sampel yang ditetapkan pada awal tahun.

IKU 6. Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Keputusan/ rekomendasi pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/ distribusi obat dan makanan. Baik terhadap sarana yang Memenuhi Ketentuan Maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Keputusan/ rekomendasi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus dan pengaduan konsumen. Stakeholder yang dimaksud meliputi pelaku usaha dan lintas ektor.

Tindak lanjut yang cepat dan tepat dari stakeholder terkait keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan sangat penting untuk mencegah risiko kesehatan dan risiko lainnya yang dapat ditimbulkan oleh proses produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak sesuai ketentuan.

Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025

Tabel ... Realisasi Kinerja **Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder**

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	56	60,82	108,61
				Sangat Baik

Realisasi persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti stakeholder sebesar 60,82% melebihi target TW 1 sebesar 56%, sehingga capaian pada TW 1 sebesar 108,61% berada pada kategori **Sangat Baik**. Pada TW 1 belum ada rekomendasi ke lintas sektor sehingga komponen rekomendasi yang ditindaklanjuti 100% berasal dari pelaku usaha.

Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	60,82	70,72	 Akan Tercapai

Realisasi Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada TW 1 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Tahun 2025. Hal ini terjadi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga pencapaiannya baru dapat tercapai di akhir Tahun 2025. Akan terus

dilakukan upaya untuk mencapai realisasi sesuai dengan target akhir tahun yang telah ditetapkan.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan kinerja Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder hingga TW I adalah :

- h. Melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif terhadap *feedback*/ tindak lanjut hasil pengawasan.
- i. Melakukan komunikasi aktif dengan stakeholder untuk memberikan *feedback*/ tindak lanjut hasil pengawasan BBPOM di Semarang.
- j. Melakukan sosialisasi/ bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk memudahkan pelaku usaha dalam menyelesaikan kendala/permasalahan yang sedang dihadapi.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Dalam rangka meningkatkan kinerja selanjutnya akan dilakukan upaya :

1. Melakukan pengembangan aplikasi untuk monitoring evaluasi CAPA terintegrasi, yaitu aplikasi SIMONCER.
2. Secara berkelanjutan melakukan monitoring terhadap *feedback*/ tindak lanjut hasil pengawasan.
3. Melakukan komunikasi aktif dengan stakeholder untuk memberikan *feedback*/ tindak lanjut hasil pengawasan BBPOM di Semarang.
4. Melakukan desk CAPA terkait keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	65.855.250	9.061.385	13,76	108,607	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran pada TW 1 tidak efisien. Adanya efisiensi anggaran pada TW 1 menyebabkan kegiatan terkait IKU dilaksanakan secara daring, seperti Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Produsen Obat Bahan Alam yang TMS Kadar Air pada tanggal 24 Maret 2025 melalui media *zoom meeting*. Perhitungan IKU didasarkan pada surat *feedback*/ tindak lanjut dari stakeholder yang disampaikan kepada BBPOM di Semarang.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- h. Penggunaan kartu kendali inspeksi untuk melakukan monitoring *feedback*/ tindak lanjut dari stakeholder.
- i. Menentukan *cutoff* dalam perhitungan *feedback*/ tindak lanjut dari stakeholder.

- j. Komunikasi secara aktif melalui WA Layanan Inspeksi kepada stakeholder untuk memberikan *feedback*/ tindak lanjut terkait hasil pengawasan.
- k. Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Produsen Obat Bahan Alam yang TMS Kadar Air pada tanggal 24 Maret 2025 melalui media daring.

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 maka dilakukan pemanfaatan informasi untuk meningkatkan capaian kinerja dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif terhadap *feedback*/ tindak lanjut hasil pengawasan serta komunikasi aktif dengan stakeholder untuk memberikan *feedback*/ tindak lanjut.

IKU 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi:

- 1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- 2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
- 3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan rumus:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= (Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%.

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

1. Pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

1. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
3. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025**

Tabel ... Realisasi Kinerja **Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
				100,32
				Sangat Baik

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I tahun 2025 realisasi kinerja adalah 90,29%, tercapai 100,32% dibandingkan dengan target TW I, dengan kategori capaian **sangat baik**.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.**

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
					

Realisasi persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW I Tahun 2025 adalah 90,29% mencapai target 100, 32% dari yang telah ditetapkan dalam Tahun 2025. Realisasi kinerja TW I **tercapai melampaui target** Tahun 2025. Hal ini terjadi karena penetapan target indikator ini bersifat rata-rata untuk TW I, TW II, TW III, dan TW IV dengan target tiap TWnya sama dengan target tahunannya yaitu 90%.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung capaian kinerja TW I adalah:

- Meningkatkan koordinasi dengan kedeputan Badan POM RI untuk penetapan target sarana dan tindak lanjutnya kepada sarana.
- Meningkatkan koordinasi dan monitoring antar inspektur internal untuk terlaksananya pemeriksaan, pelaporan, dan tindak lanjut tepat waktu dan sesuai keteneuan.
- Menyesuaikan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dengan ketersediaan anggaran baik selama efisiensi maupun relaksasi.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, koordinasi internal dan eksternal, serta peningkatan kompetensi personel secara *continuous improvement*.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
		65.855.250	9.061.385	13,76		

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien. Capaian indikator 100,32% namun realisasi anggaran 13,76%; hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan perhitungan antara capaian IKU dan realisasi anggaran. Penetapan target indikator ini bersifat rata-rata untuk tiap TWnya dan tidak bersifat kumulatif, sedangkan realisasi anggran perhitungannya bersifat kumulatif. Revisi anggaran dalam TW I Tahun 2025 relative masih kecil karena adanya blokir anggaran dalam rangka efisiensi yang ditetapkan oleh pemerintah.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- a. Koordinasi dan komunikasi inspektur BBPOM Di Semarang secara intensif.
- b. Komitmen dari seluruh inspektur untuk pelaporan dan tindak lanjut tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
- c. Kompetensi inspektur yang memadai dan selalu *update* mendukung pelaksanaan dan penyelesaian pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.
- d. Monitoring dan evaluasi dari manajemen BBPOM di Semarang secara terpadu menunjang keberhasilan indikator ini.

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen dan pimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perbaikan secara terus menerus, penetapan arah dan kebijakan, serta pengambilan keputusan.

IKU 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku otoritas keamanan pangan, senantiasa melakukan pengawasan pangan olahan baik sebelum beredar (pre market) maupun setelah pangan beredar di masyarakat (post-market control) terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Pengawasan sarana produksi pangan olahan memiliki peran strategis karena selain untuk perlindungan kesehatan konsumen akan pangan olahan yang layak, aman, bermutu dan bergizi, juga berperan dalam meningkatkan daya saing mutu produk di pasar lokal maupun global.

Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan membandingkan jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh sarana yang diperiksa.

Tujuan dari indikator persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana produksi pangan olahan yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD ataupun PIRT di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi ketepatan waktu tindak lanjut dan kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025**

Tabel ... Realisasi Kinerja **Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		

Sampai dengan TW I persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan masih belum diminta dalam RHPK karena DO masih dalam pembahasan. Namun demikian program pemeriksaan sarana produksi pangan olahan telah dilaksanakan. Sampai dengan TW I jumlah sarana yang telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sejumlah 31 sarana sesuai dengan target renlak UPT. Dengan demikian realisasi sampai TW I sebesar 100% dan capaian pada TW I sebesar 117,65%

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.**

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85			

Realisasi persentase jumlah sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW I dibandingkan dengan target tahun 2025 sejumlah 147 sarana sebesar 21,09%.

Capaian pada TW I dibanding dengan target tahunan 2025 dengan target 85 % adalah sebesar 24,81%

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan program aman hingga TW I adalah:

- k. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan atau UPT lain untuk melakukan pembinaan pada sarana produksi pangan olahan baik dengan izin edar MD ataupun PIRT.
- l. Menumbuhkan dukungan dari lintas sektor terkait dalam melakukan pemeriksaan tindak lanjut pada sarana produksi pangan olahan dengan izin edar MD ataupun sarana industri rumah tangga pangan.
- m. Mendorong pelaku usaha untuk patuh dalam penerapan cara produksi pangan olahan yang baik

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Untuk meningkatkan capaian tahunan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan pada TW II akan dilakukan penambahan target pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan target tahun 2025.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	65.855.250	9.061.385	13,76		

Berdasarkan tabel diatas realisasi anggaran pada TW I sebesar 13,76% sedangkan capaian IKU sebesar 117,65%.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
 - l. Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan berdasarkan target UPT sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - m. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan Badan POM atau UPT lain.
 - n. Pemeriksaan sarana produksi industri rumah tangga pangan berdasarkan pengaduan dari Masyarakat.
 - o. Koordinasi bersama lintas sektor dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana terutama pada sarana industri rumah tanggangan pangan.
 - p. Bersinergi dengan lintas sektor atau UPT lain dalam melaksanakan pemeriksaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja pada TW I dilakukan efisiensi anggaran sehingga dilakukan exercise penyesuaian target jumlah sarana produksi pangan olahan yang diperiksa sesuai dengan efisiensi anggaran yang ada. Namun demikian pada akhir TW I pemerintah menetapkan relaksasi anggaran termasuk kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sehingga pada TW 2 dilakukan peningkatan jumlah pemeriksaan sarana produksi pangan olahan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

IKU 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi bertujuan untuk memastikan bahwa sediaan farmasi dikelola sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga mutu dan keamanan sediaan farmasi tetap terjaga hingga ke tangan konsumen.

Sarana distribusi Sediaan Farmasi adalah sarana/ fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi :

1. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian.
2. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer.
4. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan notifikasi.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025**

Tabel ... Realisasi Kinerja **Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75			

Pada TW 1 tahun 2025, Balai Besar POM di Semarang telah melakukan pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi sebanyak 86 sarana dengan rincian fasilitas distribusi obat sebanyak 11 sarana, pelayanan kefarmasian sebanyak 30 sarana, distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan sebanyak 18 sarana serta distribusi kosmetik sebanyak 27 sarana. Terhadap hasil pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi pada TW 1 sebesar 100% melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 96,75%.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.**

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,75			

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi pada TW 1 sebesar 100% melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 96,75%.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hingga TW I adalah :

- n. Adanya efisiensi anggaran pada awal tahun 2025 dapat berpengaruh pada kinerja BBPOM di Semarang. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan secara aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pusat terkait target pemeriksaan dan solusi yang dapat dilakukan.
- o. Melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif terhadap hasil pemeriksaan distribusi Sediaan Farmasi, tindak lanjut dan pelaporan sesuai pedoman dan *timeline* yang telah ditetapkan.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Dalam rangka meningkatkan kinerja selanjutnya akan dilakukan upaya :

1. Peningkatan kompetensi inspektur/petugas melalui kegiatan pelatihan/ sosialisasi/ bimtek terkait peraturan dan pedoman terkini khususnya terkait pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi. Dengan mengikuti kegiatan pelatihan/ sosialisasi/ bimtek diharapkan

pemahaman inspektur/petugas meningkat sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Secara berkelanjutan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan distribusi Sediaan Farmasi, tindak lanjut dan pelaporan sesuai pedoman dan *timeline* yang telah ditetapkan.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
		650.500.000	36.070.430	5,55		

Pada awal tahun atau TW 1 diberlakukan kebijakan efisiensi anggaran. Penggunaan sumber daya berupa anggaran untuk mencapai kinerja persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 5,55% dari Pagu Anggaran yang disediakan. Setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian kinerja persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain :

- q. BBPOM di Semarang secara aktif mengikuti Forum Komunikasi (Forkom) dengan pusat terkait adanya efisiensi anggaran pada awal tahun 2025 untuk melakukan penyesuaian target.
- r. Pemeriksaan secara daring terhadap sebagian fasilitas distribusi Sediaan Farmasi.
- s. Penggunaan kartu kendali inspeksi untuk melakukan monitoring timeline pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- t. Monitoring dan evaluasi secara aktif oleh Ketua Tim dan koordinator yang telah ditunjuk agar petugas menyelesaikan tugas sesuai timeline dan ketentuan.
- u. Mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi bulanan yang diselenggarakan oleh pusat.

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 maka dilakukan pemanfaatan informasi untuk meningkatkan capaian kinerja dengan melakukan melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif terhadap hasil pemeriksaan distribusi Sediaan Farmasi, tindak lanjut dan pelaporan sesuai ketentuan dan *timeline* yang telah ditetapkan.

IKU 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan

yang diperiksa; ketepatan waktu pelaporan; dan kesesuaian tindak lanjut. Tindak lanjut pemeriksaan dihitung terhadap tindak lanjut pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dan tindaklanjutnya merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan di wilayah BBPOM di Semarang. Sarana distribusi pangan olahan/ritel merupakan garda terdepan keamanan dan mutu pangan di tingkat peredaran sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari penjaminan keamanan pangan. Sarana distribusi pangan olahan yang menjadi target pemeriksaan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran pangan olahan. Sesuai definisi tersebut maka yang menjadi target pemeriksaan meliputi toko, minimarket, swalayan, grosir, distributor, dan importir. Badan POM telah menerbitkan pedoman sebagai acuan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yaitu Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik (Toko Modern) tahun 2011 dan Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional tahun 2015.

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025**

Tabel ... Realisasi Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00
				Tidak dapat disimpulkan

Pada TW I tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 47 sarana dari target tahun 2025 sebanyak 157 sarana distribusi pangan olahan baik di pasar tradisional maupun toko modern. Dari 47 sarana yang diperiksa, seluruhnya diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sehingga realisasi pada TW I adalah 100% dan diperoleh capaian sebesar 125%. Meskipun demikian nilai 125% tidak dapat disimpulkan karena sangat tinggi/di atas kisaran 110%.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.**

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	 Tercapai/ Melampaui

Realisasi sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I tahun 2025 sebesar 100% telah melampaui target yang ditetapkan 80% sehingga capaian pada TW I sebesar 125%.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai ketentuan pada TW I adalah:

1. Melakukan penyusunan rencana dan target pemeriksaan sarana secara proporsional.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan target pemeriksaan sarana termasuk tindak lanjutnya berdasarkan SOP dan pedoman.

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan hasil pemeriksaan sarana melalui aplikasi SIPT sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
4. Meningkatkan kompetensi dan pemahaman inspektur pengawas pangan melalui pelatihan/bimtek baik secara luring maupun daring.
5. Melakukan pengawalan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam penyusunan tindakan perbaikan dan pencegahan hasil pemeriksaan mendorong pelaku usaha agar mampu melakukan pengawasan mandiri.
6. Pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan, pelaku usaha dan masyarakat.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi lebih ketat terhadap pelaksanaan target pemeriksaan, pelaporan dan tindak lanjutnya.
2. Memberikan informasi/sosialisasi secara berkala terkait realisasi dan capaian kinerja sebagai tanggung jawab tim yang harus didukung oleh semua anggota tim.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	650.500.000	36.070.430	5,55	125,000	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien. Realisasi anggaran 5,55% sangat rendah dibanding capaian IKU 125%. Hal ini disebabkan pada TW I terdapat blocking anggaran sementara sehingga pelaksanaan pemeriksaan belum maksimal sesuai target yang ditetapkan.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- Pelaksanaan kegiatan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan penetapan tindak lanjutnya sesuai petunjuk/arahan Badan POM.
- Monitoring dan evaluasi pelaporan melalui aplikasi SIPT.
- Monitoring dan evaluasi penyusunan tindak lanjut berdasarkan draft surat yang masuk untuk dikoreksi.
- Sosialisasi peraturan/pedoman terkini terkait distribusi pangan olahan, termasuk jika ada surat penarikan produk pangan olahan sebagai bahan pengawasan di sarana.

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja dilakukan penyesuaian kegiatan untuk mencapai target kinerja, penyesuaian penggunaan anggaran secara efisien, evaluasi terhadap capaian keberhasilan kinerja termasuk tindak lanjut atas rekomendasi kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja pada periode berikutnya.

IKU 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan diawasi pada pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari rata-rata persentase iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.

Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari

- a. Pemenuhan jumlah target pengawasan
- b. Ketepatan waktu pelaporan

Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari :

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target
- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari :

- a. Pemenuhan target pengawasan
- b. Ketepatan waktu pelaporan
- c. Akurasi pengambilan Keputusan

Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari :

- a. Pemenuhan target pengawasan
- b. Ketepatan waktu pelaporan
- c. Akurasi pengambilan Keputusan

Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dihitung dari :

- a. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling
- b. Pemenuhan target pengawasan
- c. Ketepatan waktu pelaporan

Informasi yang disampaikan melalui iklan, merupakan acuan bagi masyarakat untuk menentukan sediaan farmasi dan pangan olahan mana yang akan dibeli. Sehingga iklan sediaan farmasi dan pangan olahan harus benar, jujur dan bertanggungjawab. Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan mutu.

▪ Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025

Tabel ... Realisasi Kinerja **Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan**

No.	IKU	Target TWI	Realisasi	Capaian (%)
				115,90
				Tidak dapat disimpulkan

Pada TW 1 telah dilakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sejumlah 351 iklan yang meliputi 73 iklan obat, 47 iklan obat bahan alam, 15 iklan suplemen kesehatan, 89 iklan kosmetik dan 127 iklan pangan olahan. Realisasi IKU Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada TW 1 sebesar 99,52 % dari target IKU sebesar 85,87%, sehingga capaian IKU pada TW 1 sebesar 115,90 %.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.**

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
					▲

Realisasi IKU Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada TW 1 (99,52 %) melampaui target IKU tahun 2025 (85,87%) dengan capaian sebesar 115,90 %.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan hingga TW I adalah :

- Koordinasi yang baik dan intensif baik internal maupun eksternal dengan Unit Pengampu terkait renlak pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- Sosialisasi kepada petugas pengawas iklan terkait penilaian IKU Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sehingga semua petugas berkomitmen dalam memenuhi target IKU
- Penunjukan koordinator pengawasan iklan untuk masing masing komoditi yaitu koordinator iklan obat, koordinator iklan obat bahan alam dan suplemen kesehatan, koordinator iklan kosmetik dan koordinator iklan pangan sehingga monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan efektif.
- Bersinergi dengan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan distribusi pangan olahan dalam pengambilan iklan pada media cetak dan media luar ruang sehingga cakupan pengawasan lebih luas.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

- Meningkatkan koordinasi yang baik dan intensif baik internal maupun eksternal dengan Unit Pengampu terkait renlak pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- Meningkatkan kompetensi petugas pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan bimtek dan sosialisasi terkait pengawasan iklan.
- Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.

4. Meningkatkan sinergitas dengan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan distribusi pangan olahan dalam pengambilan iklan pada media cetak dan media luar ruang sehingga cakupan pengawasan lebih luas.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
		65.855.250	9.061.385	13,76		

Realisasi anggaran pada TW 1 hanya mencapai 13,76% dari pagu anggaran tahun 2025, sehingga tingkat efisiensi anggaran tidak efisien. Hal ini disebabkan pada TW 1 terdapat blokir/efisiensi anggaran perjalanan dinas sehingga perjalanan dinas untuk pengambilan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan menyesuaikan anggaran yang ada. Selain itu proporsi target pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada media online dan media penyiaran lebih banyak dibandingkan iklan pada media cetak dan media luar ruang. Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang pada TW 1 sejumlah 351 iklan (25,94%) dari target iklan tahun 2025 sebesar 1353 iklan.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- a. Koordinasi yang baik dan intensif baik internal maupun eksternal dengan Unit Pengampu sehingga pengawasan iklan dpata dilakukan sesuai ketentuan.
- b. Monitoring dan evaluasi pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif sehingga target IKU dapat tercapai (melampaui target).
- c. Bersinergi dengan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan distribusi pangan olahan dalam pengambilan iklan pada media cetak dan media luar ruang sehingga cakupan pengawasan lebih luas.

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan agar sesuai dengan target IKU dengan anggaran yang efisien.

SK 2. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

Tabel Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 2

No.	Sasaran Kegiatan	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	16,82	15,89	94,47
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK)					94,47

SK 2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi diukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 yaitu Sebesar **94,47 (Baik)**. Ini mendakan bahwa BBPOM Semarang telah efektif dalam mengawasi Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerjanya.

IKU 12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kecukupan pangan merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini karena, kekurangan asupan pangan akan berimbas pada kekurangan asupan zat gizi yang diperlukan untuk hidup sehat berkualitas. Kekurangan zat gizi mikro di Indonesia seringkali berkaitan dengan pola konsumsi yang kurang beragam, akses terbatas terhadap makanan bergizi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai intervensi untuk menangani masalah ini, termasuk program fortifikasi pangan yang bertujuan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan dengan menambahkan zat-zat gizi mikro yang penting, seperti vitamin dan mineral, pada bahan pangan pokok seperti garam, tepung terigu, dan minyak goreng.

BPOM dalam hal ini Balai Besar POM di Semarang berperan dalam pemantauan dan evaluasi dalam program fortifikasi melalui pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi, sampling produk pangan fortifikasi di sarana produksi dan pengujian produk pangan fortifikasi. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang yang ditindaklanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dari jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman dibagi dengan jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang ada dalam cakupan wilayah pemeriksaan Balai Besar POM di Semarang (berdasarkan baseline data sejumlah 107 sarana).

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025**

Tabel ... Realisasi Kinerja **Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

No.		Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	16,82	15,89	94,47
				Baik

Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I sejumlah 17 sarana sehingga realisasinya sebesar 15,89% yang diperoleh dengan membandingkan dengan jumlah seluruh sarana produksi pangan fortifikasi yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang yaitu sejumlah 107 sarana (baseline pembagian). Target yang ditetapkan pada TW I sebesar 16,82% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 94,47% dengan kategori Baik.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.**

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025 IKU Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54	15,89	29,43	 Perlu Upaya Keras

Realisasi persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Capaian sampai dengan TW I dibandingkan dengan target tahunan sebesar 29,43%. Hal ini disebabkan karena target indikator ini bersifat kumulatif sehingga target akan tercapai pada waktu yang ditetapkan (bulan Juli 2025). Untuk itu, masih diperlukan upaya keras untuk mencapai target tahunan yang telah ditetapkan.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Semarang untuk mendukung keberhasilan Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I adalah :

- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam memproduksi produk pangan fortifikasi sesuai dengan ketentuan sehingga dapat menghasilkan produk pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.
- Mendorong komitmen pelaku usaha untuk dapat menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik dalam produksi pangan olahan fortifikasi dan melakukan perbaikan terhadap temuan/ ketidaksesuaian hasil pemeriksaan dan pengujian.
- Bekerja sama dengan lintas sektor terkait dengan fortifikasi pangan di Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan maka Balai Besar POM di Semarang tetap berkomunikasi dan mendorong pelaku usaha pangan fortifikasi untuk mau melakukan perbaikan terhadap temuan yang ada dan atau hasil uji produk pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat.

Selain itu juga melakukan penjadwalan untuk pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan relaksasi anggaran yang berlaku agar target tercapai.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.195.000	35.000	0,04	94,471	Tidak Efisien

Pada table diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya berupa anggaran dengan realisasi sebesar 0,04%, jika dibandingkan dengan capaian IKU (94,71%) berada pada tingkat tidak efisien. Hal ini disebabkan karena anggaran fortifikasi yang digunakan

hanya untuk pembelian sampel saja sedangkan anggaran perjalanan dinas yang digunakan adalah anggaran perjalanan dinas pemeriksaan sarana produksi.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi oleh Balai Besar POM di Semarang yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sesuai dengan jadwal UPT.
- Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi berdasarkan rekomendasi/ surat tindak lanjut hasil pengawasan Badan POM.
- Sampling produk pangan fortifikasi di sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa.
- Pengujian sampel pangan fortifikasi oleh Laboratorium Balai Besar POM di Semarang sesuai dengan prioritas sampel.
- Sebagai narasumber pada lokakarya peningkatan kapasitas untuk pemangku kepentingan pada tanggal 18 Februari 2025 di Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan yang berkaitan dengan fortifikasi pangan di Provinsi Jawa Tengah. Lokakarya tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait seperti Bappeda, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pertanian, dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus dan APROGAKOB.

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja pada TW I dilakukan efisiensi anggaran sehingga dilakukan excersice sesuai dengan efisiensi anggaran yang ada. Namun demikian pada akhir TW I pemerintah menetapkan relaksasi anggaran termasuk cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sehingga pada TW 2 dilakukan peningkatan jumlah pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

SK 3. MENGUATNYA LAB PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI SEMARANG

Tabel Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 3

No.	Sasaran Kegiatan	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Semarang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,31	82,40	117,20
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK)					110,00

SK 3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang di ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 yaitu Sebesar **110 (Tidak dapat disimpulkan)**. Ini mendakan

bahwa BBPOM Semarang telah mampu menguatkan Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerjanya.

IKU 13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Semarang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah suatu cakupan kemampuan laboratorium kimia dan biologi yang harus dipenuhi oleh setiap laboratorium dalam rangka peningkatan kapabilitas dan kapasitas laboratorium. Terdapat lima tingkatan laboratorium (Tier) di lingkungan Badan POM, yaitu : Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) sebagai Laboratorium Tingkat 5, Laboratorium Balai Besar POM yang merupakan Laboratorium Regional sebagai Laboratorium Tingkat 4, Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi sebagai Laboratorium Tingkat 3, Laboratorium di Balai POM di Kabupaten/Kota sebagai Laboratorium Tingkat 2 dan Laboratorium Loka POM sebagai Laboratorium Tingkat 1.

Balai Besar POM di Semarang sebagai laboratorium Regional merupakan Laboratorium Tingkat 4, yang memiliki tugas :

1. Melakukan pengujian unggul Obat dan Makanan
2. Melakukan pengujian dasar dan pengujian lain selain parameter unggul Kimia dan Mikrobiologi
3. Mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional
4. Melakukan pengujian konfirmasi dari Tier di bawahnya

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) merupakan standar yang ditetapkan Badan POM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium, dan standar tersebut digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium Balai Besar/Balai POM dalam melakukan fungsi pengujian sampel Obat dan Makanan di laboratorium kimia dan biologi

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tingkat 3 dan 4 adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium Regional dan dan Laboratorium Provinsi Balai Besar/Balai POM tahun 2025 – 2029 yang terdiri dari 4 komponen yaitu

1. Standar Ruang Lingkup (SRL)
2. Standar Peralatan laboratorium
3. Standar Kompetensi Laboratorium
4. Standar Metode Analisa Terverifikasi

Penjelasan dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

1. Standar Ruang Lingkup
Suatu cakupan pengujian kimia dan biologi yang menggambarkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium, meliputi pengujian obat, nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan mikrobiologi.
2. Standar Peralatan

Peralatan yang harus dimiliki oleh laboratorium sehingga pengujian dapat dilaksanakan sesuai lingkungannya

3. Standar Kompetensi Laboratorium

Kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten

4. Standar Metode Terverifikasi

Metode Analisa yang akan diverifikasi oleh laboratorium

Empat komponen SKL tersebut dinilai berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan telah disosialisasikan kepada seluruh UPT ,

Penilaian Pemenuhan SKL Tingkat 3 dan Tingkat 4 tahun 2025-2029 adalah :

Standar Ruang Lingkup 50% + Standar Kompetensi Laboratorium 20% + Standar Peralatan 20% + Standar Metode Terverifikasi 10%

Berikut Target SKL BBPOM Semarang tahun 2025-2029

No.	Balai Besar POM	2025	2026	2027	2028	2029
6	Semarang	79,7	82,5	84,9	87,4	89,6

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025**

Tabel ... Realisasi Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Semarang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Semarang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,31	82,4	117,20
				Tidak dapat disimpulkan

Pengukuran Standar Kemampuan Laboratorium dilaksanakan pada tiap Triwulan di tiap-tiap UPT. Sampai akhir TW I tahun 2025 realisasi kinerja Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 82,4% atau tercapai 117,20 %. Di Tahapan ini penilaian telah dilakukan untuk 4 komponen secara mandiri oleh UPT dan telah diverifikasi oleh P3OMN.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.**

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Semarang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79,7	82,40	103,39	 Tercapai/ Melampaui

Realisasi Nilai Pemenuhan SKL TW I Tahun 2025 telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Tahun 2025.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan 1 :

- p. Membuat pemetaan kemampuan personil laboratorium yang disandingkan dengan ruang lingkup pengujian di tiap-tiap komoditi yaitu Pangan, Obat, OBA dan Suplemen Kesehatan, Kosmetik, serta Mikrobiologi.
- q. Menyusun kebutuhan kompetensi personil dan kepenyeliaan, serta merencanakan bimbingan teknis pengujian laboratorium sesuai ruang lingkup
- r. Mereviu perencanaan pemenuhan SKL tiap Triwulan dan merinci menjadi tiap-tiap bulan, serta melakukan monitoring terus-menerus
- s. Meningkatkan pemenuhan sumber daya untuk pemenuhan ruang lingkup pengujian dan verifikasi metoda analisa, seperti mengoptimalkan persediaan reagen, media mikrobiologi, baku pembanding, serta penunjang pengujian (alat habis pakai dan gas).Pengoptimalan ini sangat penting, mengingat pada Triwulan 1 terbit surat edaran untuk efisiensi anggaran, sehingga belum dapat melakukan pengadaan reagen/media maupun alat laboratorium

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Dalam rangka melaksanakan pemenuhan SKL sesuai dengan target di tiap-tiap Triwulan, masing-masing laboratorium memiliki penanggungjawab untuk memonitor pelaksanaan rencana pemenuhan ruang lingkup, kompetensi personil, peralatan laboratorium dan metoda analisa yang terverifikasi yang telah dibuat, serta memaksimalkan kerja Tim SDM dan Tim Peralatan Laboratorium, sehingga dapat meminimalkan kendala yang dihadapi

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM Semarang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Semarang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9.630.584.000	104.493.800	1,09	117,195	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien. Capaian indikator 117,95% karena penetapan target awal terlalu rendah. Adanya surat edaran untuk efisiensi anggaran sehingga tersisa 25 % dari pagu awal, sangat membatasi penggunaan anggaran sesuai perencanaan, akibatnya belanja kebutuhan untuk pengujian menjadi sangat kecil dan gap nya menjadi sangat besar.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- v. Sosialisasi dan Pendampingan penilaian mandiri SKL di tiap-tiap Triwulan dilakukan oleh P3OMN
- w. Bimtek dan Pelatihan internal yang dilakukan mandiri oleh BBPOM Semarang dengan narasumber dari P3OMN dan eksternal

- x. Berkoordinasi secara intensif dengan Balai Kalibrasi P3OMN terkait standar alat laboratorium, Laboratorium Baku Pembanding P3OMN terkait pemenuhan kebutuhan baku untuk pelaksanaan ruang lingkup dan verifikasi MA, serta dengan PPSPDM BPOM dan P3OMN terkait kebutuhan pelatihan personil untuk pemenuhan kompetensi SDM.

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja dilakukan reviu peta kemampuan uji laboratorium, dan diinformasikan kepada pengguna baik internal Badan POM atau eksternal Pihak 3, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menambah informasi perluasan kapasitas uji laboratorium

SK 4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA BBPOM DI SEMARANG

Tabel Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 4

No.	Sasaran Kegiatan	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	90,25	104,43
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20%	25%	125,00
		Jumlah desa pangan aman	28%	25%	89,29
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20%	25%	125,00
	Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK)				103,43

SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Semarang di ukur dengan 4 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 yaitu Sebesar **103,43 (Sangat Baik)**. Ini menandakan bahwa BBPOM Semarang telah efektif dalam melaksanakan KIE di wilayah kerjanya.

IKU 14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

Tingkat Efektifitas KIE adalah ukuran efektifitas atau kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Responden KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat

sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM. Indikator efektifitas KIE diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

BBPOM di Semarang telah melaksanakan Survei Efektifitas KIE terhadap 239 responden yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu kuesioner KIE Tatap Muka/Langsung dan kuesioner Media. Kuesioner tatap muka diberikan hanya kepada responden yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan antara lain KIE kepada tokoh masyarakat serta KIE obat dan makanan yang diselenggarakan oleh UPT baik secara daring maupun tatap muka. Sedangkan kuesioner media diberikan hanya kepada responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Hingga triwulan I tahun 2025 diperoleh capaian indeks tingkat efektifitas KIE BBPOM di Semarang sebesar 90,25 yang diperoleh dari rata-rata indeks KIE tatap muka (83,831) dan KIE media (96,667). Capaian KIE Triwulan I ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 86,42 atau dengan capaian 104,43% dengan kriteria **Sangat Baik**.

▪ Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025

Tabel ... Realisasi Kinerja **Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang**

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	90,25	104,43 Sangat Baik

Realisasi yang diperoleh pada triwulan I tahun 2025 melebihi target, hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik dengan tenaga ahli maupun panitia daerah dalam pelaksanaan KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat. KIE Bersama tokoh masyarakat di TWI ini melibatkan 978 peserta di 5 titik yang tersebar di beberapa Kabupaten yaitu di Kabupaten Cilacap, Purworejo, Grobogan, Wonosobo, dan Banyumas.

Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025 IKU Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	90,25	104,43	 Tercapai/ Melampaui

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan triwulan I tahun 2025 sudah mencapai target Tahun 2025 dengan kategori Tercapai / Melampaui. Namun

demikian masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Tahun 2025 tetap dapat tercapai.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Berdasarkan hasil survey pada triwulan I tahun 2025, capaian yang diperoleh melebihi target, dengan capaian 104,43 . Hal-hal yang mempengaruhi capaian target:

1. Pendampingan responden dalam pengisian kuesioner dalam penyamaan persepsi dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan responden yang beragam
2. Perbaikan yang berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan KIE melalui telaah evaluasi penyelenggaraan kegiatan
3. Koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik dengan tenaga ahli maupun panitia daerah dalam mendukung penyelenggaraan KIE
4. Penambahan variasi kegiatan khususnya pada saat KIE secara langsung (sasaran target peserta dengan latar belakang profesi yang beragam)
5. Penyediaan kanal media KIE dan produk informasi Balai Besar POM di Semarang yang mudah diakses terutama bagi kelompok rentan

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Dalam rangka perbaikan berkelanjutan perlu adanya peningkatan ragam dan variasi kegiatan KIE tatap muka serta penyediaan konten yang menarik dan bervariasi yang mudah diakses sehingga diharapkan responden dapat merasakan manfaat dari KIE yang diberikan.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	17.055.022.000	45.497.120	0,27	104,432	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak dapat dinilai karena capaian indikator jauh melebihi realisasi anggaran. Nilai tersebut kemungkinan dapat berubah jika semua kegiatan KIE telah dilaksanakan.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- Pengembangan kegiatan KIE yang dilakukan secara mandiri berupa Shara Sehan (Sharing Informasi Tentang Obat dan Pangan Sehat dan Aman yang dilaksanakan secara rutin
- Bersinergi dengan kegiatan yang merupakan inovasi dari BBPOM Semarang yaitu kegiatan Layanan CEKATAN (PengeCEKAn laboratorium untuk masyarakat dan sekolahAN) yang juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta komunitas sekolah

pada keamanan pangan dan mendekatkan layanan laboratorium BBPOM di Semarang, sehingga kegiatan dapat menunjang keberhasilan indikator ini.

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2024/interim triwulanan TW I Tahun 2025, dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi BBPOM di Semarang Tahun 2025.

IKU 15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Jumlah sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah dengan kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi serta inovasi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi keamanan PJAS adalah menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Satuan Pendidikan yang diintervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA.

Tahapan pelaksanaan intervensi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan adalah meliputi tahapan advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (SAPA Sekolah), sosialisasi keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Bimtek kader keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sekolah, dan pengawalan sekolah yang sudah diintervensi keamanan pangan.

Intervensi utama dilakukan melalui bimbingan teknis keamanan pangan yang diberikan kepada siswa dan guru, pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah benar-benar menerapkan persyaratan keamanan pangan dalam rangka pembudayaan keamanan pangan.

Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025

Tabel ... Realisasi Kinerja **Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan**

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0,2	0,25	125,00
				Tidak dapat disimpulkan

Intervensi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dilaksanakan pada satuan Pendidikan mulai tingkat SD/MI, SMP/MTS, dan SMK/SMA/MA di Kabupaten Semarang. Sampai akhir TW I tahun 2025 realisasi kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, tahapan program yang telah

dilaksanakan adalah tahap advokasi lintas sektor terhadap program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.**

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	25%	25,00	 Perlu Upaya Keras

Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman TW I Tahun 2025 melebihi target awal yang telah ditetapkan dalam Tahun 2025. Hal ini disebabkan adanya perubahan pembobotan tahapan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Target awal tahun 2025 sebesar 20% (0,2) berubah menjadi 25% (0,25) karena terdapat tahapan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dihilangkan yaitu pemberian paket edukasi dan penggabungan tahap Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Kader digabung dengan Sertifikasi Sekolah karena adanya efisiensi.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan program sekolah dengan PJAS aman hingga TW I adalah:

- Meningkatkan koordinasi yang baik dan intensif dengan lintas sektor (Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota lokus intervensi) dalam mendorong sekolah untuk mengimplementasikan program keamanan pangan.
- Mendorong komitmen sekolah dan peran aktif kader keamanan pangan sekolah yang diintervensi dalam melakukan tindak lanjut program keamanan pangan kepada komunitas sekolah dengan memberikan akses dan *tools* yang mudah didapat untuk pelaksanaan tindak lanjut kader.
- Melakukan pendampingan intensif dan berkelanjutan kepada kader keamanan pangan sekolah untuk melaksanakan rencana aksi dan inovasi keamanan pangan.
- Menumbuhkan dukungan dari pihak internal maupun lintas sektor terkait pelaksanaan kegiatan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan agar program berjalan lancar dan efektif.
- Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus kepada sekolah yang telah diintervensi dengan memberikan penyegaran pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah, sehingga mampu membuat Kepala Sekolah/Guru dan Pengelola Kantin sebagai kader keamanan pangan menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah, dan mendorong kemandirian sekolah untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dan penyebaran pesan keamanan pangan pada komunitas sekolah.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Dalam rangka melakukan perluasan cakupan sekolah yang mendapatkan sosialisasi maka sekolah yang diintervensi diwajibkan untuk melakukan pengimbasan kepada 1 sekolah yang

berada di sekitarnya sebagai bentuk komitmen sekolah dalam melaksanakan tindak lanjut kegiatan. Hal ini telah disampaikan kepada seluruh sekolah yang akan diintervensi penuh tahun 2025 ini pada saat dilakukan kegiatan Bimtek keamanan pangan kepada kader keamanan pangan sekolah. Selain itu sekolah intervensi juga berperan aktif menyebarkan konten keamanan pangan untuk meningkatkan efektifitas sosialisasi tentang keamanan pangan.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	653.579.000	5.382.000	0,82	125,000	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien. Capaian indikator 125% namun realisasi anggaran 0,82%, hal ini dikarenakan dari lima tahapan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada akhir TW 1 tahun 2025 baru terlaksana tahap advokasi lintas sektor (sesuai juknis) dan telah dilakukan revisi pagu anggaran (sesuai efisiensi).

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- Pendampingan terhadap komunitas sekolah dilakukan oleh BBPOM Di Semarang secara intensif.
- Peran serta lintas sektor dalam hal ini Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota lokus intervensi yang mendukung penuh program PJAS aman.
- Bersinergi dengan kegiatan yang merupakan inovasi dari BBPOM Semarang yaitu kegiatan Layanan CEKATAN (PengeCEKatan laboratorium untuk masyarakat dan sekolahAN) yang juga bertujuan untuk meningkatkan peran serta komunitas sekolah pada keamanan pangan dan mendekatkan layanan laboratorium BBPOM di Semarang, sehingga kegiatan dapat menunjang keberhasilan indikator ini.
- Pembuatan dan penyebaran konten tentang keamanan pangan yang diupload di medsos Balai Besar Pom di Semarang (kolaborator dengan sekolah dan lintas sektor terkait).

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja dilakukan pemberian buku pedoman PJAS series 1 dan 2, dan e-book (flasdiKS) kepada seluruh kader keamanan pangan sekolah yang diintervensi supaya kader keamanan pangan tersebut lebih memahami program dan dapat mengimplementasikannya dengan baik di sekolah masing-masing.

IKU 15. Jumlah desa pangan aman

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri.

Gerakan Keamanan Pangan Desa merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Melalui program desa pangan aman diharapkan keamanan pangan di desa tetap dapat terjamin, keamanan, mutu dan gizinya. Pelaksanaan Desa Pangan Aman disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan tujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah, salah satunya program percepatan penurunan stunting, serta untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pencapaian target-target pembangunan keberlanjutan di desa.

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) meliputi tahapan advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan tahun sebelumnya.

- **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025**

Tabel ... Realisasi Kinerja **Jumlah desa pangan aman**

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
				89,29
				Cukup

Intervensi desa pangan aman Tahun 2025 dilaksanakan di 1 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Semarang. Target intervensi adalah 6 desa baru dan 46 desa pengawalan yang merupakan target intervensi tahun dari 2020 hingga tahun 2024. Hingga akhir triwulan I progres program Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan adalah audiensi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang serta advokasi ke seluruh Lintas Sektor terkait di Kabupaten Semarang. Capaian jumlah desa pangan aman mencapai 89,29% dibawah target yang ditetapkan dengan kategori **Cukup**. Target TW I tidak tercapai karena pada pertengahan triwulan dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan tahapan program karena adanya instruksi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang efisiensi belanja Kementrian/Lembaga dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.**

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
					

Realisasi jumlah desa pangan aman hingga triwulan I tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025 dengan notifikasi **Perlu Upaya Keras**. Hal ini terjadi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga pencapaiannya baru berhasil dicapai di akhir tahun 2025.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada awal tahun renstra ini program akan dilaksanakan di 1 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Semarang dipilih kembali menjadi lokus intervensi pada tahun 2025 ini sehingga telah terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan lintas sektor terkait. Untuk Desa/Kelurahan baru yang akan diintervensi pada tahun 2025, Balai Besar POM di Semarang berupaya :

- Menumbuhkan komitmen desa/kelurahan dalam melaksanakan program desa pangan aman sehingga semua tahapan program kegiatan desa pangan aman bisa berjalan lancar.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang telah terjalin dengan lintas sektor terkait khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dan Puskesmas setempat selaku pendamping desa dan yang memiliki wilayah cukup besar untuk menggerakkan kader keamanan pangan semakin aktif.
- Memotivasi dan memfasilitasi kader keamanan pangan desa untuk selalu aktif dalam menyusun dokumen perencanaan program keamanan pangan dan melaksanakannya secara mandiri untuk menjaga kesinambungan program.
- Memberi Paket Edukasi Keamanan Pangan berupa buku kader, flipchart materi keamanan pangan dan flashdisk berisi materi-materi dan video tentang keamanan pangan yang dapat digunakan oleh kader keamanan pangan desa sebagai referensi dalam melakukan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di lingkungan desa.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Dalam rangka menjaga keberlanjutan dan mendorong replikasi Program Desa Pangan Aman maka Balai Besar POM di Semarang perlu :

- Melakukan koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pihak desa dan lintas sektor di setiap tahapan program
- Melibatkan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan tahapan kegiatan gerakan desa pangan aman terutama pada pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha pangan desa.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
		1.308.912.000	6.804.000	0,52		

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien. Capaian indikator 89,29% sedangkan realisasi anggaran hanya 0,52% karena tahapan program dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan menggunakan anggaran yang telah diefisiensi. Revisi anggaran dalam TW I tahun 2025 dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran untuk pelaksanaan program Desa Pangan Aman.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegagalan pencapaian target kinerja pada TW I ini karena target kinerja telah ditetapkan pada awal tahun, tetapi pada pertengahan triwulan dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan tahapan program karena adanya instruksi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang efisiensi belanja Kementrian/Lembaga dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2024 Balai Besar POM di Semarang melakukan penyesuaian anggaran untuk sosialisasi / bimtek komunitas bagi komunitas laki-laki dalam rangka mendukung kegiatan pengarusutamaan gender.

IKU 17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dihitung berdasarkan jumlah pasar yang memiliki kriteria bahwa pasar tersebut berlokasi permanen, memiliki pengelola pasar dan mendapat dukungan/ antusiasme dari Pemerintah Daerah setempat, pasar yang mempunyai potensi peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan, pasar yang secara umum memenuhi kriteria pasar sehat.

Tujuan intervensi PPABK adalah untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar.

Lingkup kegiatan pada program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) adalah sebagai berikut :

- 1) Forum Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Pasar. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka menggalang komitmen pemerintah daerah tentang pentingnya berbagi tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan pada setiap titik rantai pangan sesuai dengan perannya. Pemangku kepentingan yang diharapkan terlibat secara aktif, antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasar, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Bappeda
- 2) Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar kegiatan ini bertujuan untuk melatih petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya. Penyuluhan pada komunitas pasar dilakukan dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan.
- 3) Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pentingnya keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat melalui konten terkait pasar pangan aman berbasis komunitas dan keamanan pangan. Konten ini disosialisasikan melalui media sosial atau metode lainnya kepada pengelola/ paguyuban pasar kemudian disosialisasikan oleh pengelola/ paguyuban pasar kepada

komunitas pasar.

- 4) Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi dilakukan melalui kegiatan cek produk pangan olahan terdaftar melalui CEK KLIK yang dilakukan oleh komunitas pasar serta monitoring evaluasi pengelola/ paguyuban pasar yang sudah di bimtek serta penyusunan rencana aksi 2026
- 5) Pengawasan Pasar Aman dilakukan dalam rangka kegiatan monev keberlanjutan program melalui sosialisasi keamanan pangan terhadap pasar pengawasan tahun 2024

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025**

Tabel ... Realisasi Kinerja Jumlah Pasar pangan aman berbasis komunitas

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20%	25%	125,00
				Tidak dapat disimpulkan

Realisasi jumlah PPABK TW I Tahun 2025 melebihi target awal yang telah ditetapkan dalam Tahun 2025. Hal ini disebabkan adanya perubahan pembobotan tahapan program PPABK oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Target awal tahun 2025 sebesar 20% (0,2) berubah menjadi 25% (0,25) karena terdapat tahapan program PPABK yang dihilangkan yaitu survei pasar karena adanya efisiensi anggaran.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.**

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	25%	25,00	 Perlu Upaya Keras

Realisasi jumlah PPABK TW I Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Tahun 2025. Hal ini terjadi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga pencapaiannya baru dapat tercapai di akhir Tahun 2025.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan program PPABK hingga TW I adalah:

- t. Keterlibatan aktif dan sinergisme dari berbagai pihak dalam memastikan dukungan kebijakan dan implementasi program yang efektif terkait pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- u. Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang efektif dengan pengelola pasar dan lintas sektor terkait untuk memastikan program PPABK berjalan dengan lancar.
- v. Koordinasi bersama dengan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas

Perikanan dan Kelautan terkait kewenangan pengawasan pangan olahan, khususnya contoh kasus ikan asin mengandung bahan berbahaya.

- Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)
Dalam rangka upaya berkelanjutan program PPABK maka perlu dilakukan:
 1. Dilakukan penguatan komitmen dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak terkait serta peningkatan sosialisasi tentang keamanan pangan kepada komunitas pasar
 2. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi yang lebih erat antar lintas sektor terkait (Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, Pengelola Pasar, Bappeda). Komitmen bersama harus diterjemahkan dalam tindakan nyata dan sinergi program di lapangan.
- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	130.777.000	9.968.590	7,62	125,000	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien. Capaian indikator 125% namun realisasi anggaran 7,62%, hal ini dikarenakan dari lima tahapan program PPABK pada akhir TW 1 tahun 2025 baru terlaksana tahap advokasi komitmen pemerintah daerah dan lintas sektor pasar (sesuai juknis) dan telah dilakukan revisi pagu anggaran (sesuai efisiensi).

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
Adanya penyesuaian tahapan atau pembobotan sehingga menyebabkan capaian lebih besar daripada target
- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**
Laporan kinerja tahun 2024 digunakan sebagai acuan dalam program PPABK tahun 2025

SK 5. MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Tabel Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 5

No.	Sasaran Kegiatan	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	24,17	28,33	117,21
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK)					110,00

SK 5. Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu diukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 yaitu Sebesar **110 (Tidak dapat disimpulkan)**. Ini menandakan bahwa BBPOM Semarang telah mampu meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di wilayah kerjanya.

IKU 18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan atau IP CPPOB pangan olahan

Sejalan dengan konsep pengawasan BPOM saat ini yaitu pengawasan proaktif maka Balai Besar POM di Semarang giat dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha skala UMKM terutama produk pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional sebagai dukungan meningkatkan daya saing dan memperluas distribusi produk. Bentuk pendampingan yang dilakukan antara lain pembinaan saat pemeriksaan sarana, mengadakan kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha/penanggung jawab baik secara luring maupun daring, memberikan pendampingan dan pelayanan proses sertifikasi/registrasi. Selain sebagai pencapaian kinerja Balai Besar POM di Semarang, kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha skala UMKM dan dapat memberikan bukti nyata dukungan bagi UMKM sehingga secara tidak langsung juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di era pemulihan ekonomi sekarang ini.

Ruang Lingkup UMKM yang didampingi adalah UMKM Pangan olahan yang mencakup usaha mikro dan kecil, sementara untuk UMKM kosmetik dan OBA (Obat Bahan Alam) yaitu :

- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B
- UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi :
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya

Definisi UMKM yang memenuhi standar adalah :

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3)

- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025**

Tabel ... Realisasi Kinerja **Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan atau IP CPPOB pangan olahan**

No.	IKU	Target TWI	Realisasi	Capaian (%)
				117,21
				Tidak dapat disimpulkan

Pendampingan oleh BBPOM Semarang telah dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan, TW I tahun 2025 realisasi kinerja 117,21%

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.**

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
					

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan atau IP CPPOB pangan olahan TW I Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Tahun 2025. Hal ini terjadi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga pencapaiannya baru dapat tercapai di akhir Tahun 2025.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan program Pendampingan UMKM hingga TW I adalah :

- a. Melakukan pemetaan UMKM calon target pendampingan lebih awal
- b. Menargetkan kembali UMKM memiliki komitmen namun pada tahun sebelumnya belum menyelesaikan tahapan
- c. Mendorong komitmen pelaku usaha UMKM untuk mengikuti semua tahapan proses
- d. Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif untuk percepatan pemenuhan dokumentasi dan perbaikan sarana di UMKM Pangan, Obat Tradisional, maupun Kosmetik menggunakan berbagai media baik offline maupun online
- e. Melakukan pengawalan secara terus menerus kepada UMKM yang diintervensi dengan memberikan sosialisasi, dan pendampingan secara intensive oleh fasilitator pada tiap proses.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Dalam rangka penyempurnaan kinerja ke depan maka BBPOM Semarang akan melaksanakan monev sesuai tahapan yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk peningkatan capaian.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
		97.721.000	3.998.000	4,09		

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien, realisasi anggaran pada TW 1 hanya mencapai 4,09% dari pagu anggaran tahun 2025, hal tersebut karena dilakukan efisiensi/blokir anggaran dan pembatasan anggaran perjalanan dinas. Untuk mencapai IKU pendampingan kegiatan tetap dilaksanakan sesuai tahapan yang ditargetnya secara Daring

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan berkesinambungan antara lain: Inspektur Pangan, Penyuluh Keamanan Pangan, Inspektur CPOTB, Inspektur CPKB Junior, Inspektur CPKB Senior, Inspektur CPKB Kepala
- Melakukan kegiatan Sosialisasi dan bimtek terkait perijinan Obat dan Makanan
- Melakukan kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha secara intensif dengan percepatan pemenuhan dokumentasi CPPOB, CPOTB dan CPKB
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dan lintas sektor (Universitas, Pemda dan Kementrian terkait)

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja kinerja Tahun 2024/interim triwulanan TW I Tahun 2025 digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan atau IP CPPOB pangan olahan agar pelaksanaan kegiatan lebih baik kedepannya dan IKU tercapai

SK 6. TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA BBPOM DI SEMARANG

Tabel Ni lai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 6

No.	Sasaran Kegiatan	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	35	39	111,43
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK)					110,00

SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang di ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 yaitu Sebesar **110 (Tidak dapat disimpulkan)**. Ini menandakan bahwa telah terlaksana Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang.

IKU 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang

Target perkara Balai Besar POM di Semarang sebanyak 7 (tujuh) perkara. Untuk penyelesaian perkara ini diperlukan kerja sama lintas sektor yang baik. Informasi dari Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Direktorat Siber Obat dan Makanan diperlukan dalam hal pencarian target yang dapat dilakukan penyidikan, sedangkan untuk penyelesaian berkas perkara diperlukan kerja sama dengan lintas sektor yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.

Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang TW 1 tahun 2025 yaitu 39%, jika dibandingkan dengan target TW I sebesar 35%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 111,43% sehingga **Tidak dapat disimpulkan**. Rincian capaian indikator kinerja “persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Semarang” dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

▪ Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025

Tabel ... Realisasi Kinerja **Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang**

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	35	39	111,43
				Tidak dapat disimpulkan

Penyebab capaian persentase keberhasilan penindakan di TW I dalam kriteria **Tidak dapat disimpulkan** antara lain:

1. Perkara *carry over* tahun 2024 sebanyak 8 (delapan) perkara telah berhasil diselesaikan sampai dengan tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (serah tahap II) sebanyak 5 (lima) perkara, tahap P21 sebanyak 1 (satu) perkara, dan telah dilakukan penghentian penyidikan (SP3) dikarenakan tidak cukup bukti sebanyak 1 (satu) perkara. Perkembangan tahapan dalam penyelesaian perkara *carry over* yang cepat berpengaruh terhadap capaian keberhasilan penindakan dalam capaian indikator persentase keberhasilan penindakan sebesar 111,43%. Hal ini terjadi di luar perencanaan yang telah dilakukan karena pada proses ini tidak hanya bergantung dari PPNS Balai Besar POM di Semarang namun pada Direskrimsus Polda Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan pihak tersangka. Apabila tahapan perkara telah mencapai tahap P21 (berkas dinyatakan lengkap) dan tidak segera dilakukan serah tahap II karena ada batas waktu tertentu. Apabila tidak segera melakukan serah tahap II maka akan timbul P21 A (Pemberitahuan susulan hasil penyidikan sudah lengkap) dan apabila tidak bisa dipenuhi maka SPDP akan dikembalikan ke PPNS Balai Besar POM di Semarang. Selain hal itu

dikhawatirkan tersangka melarikan diri apabila tidak segera diserahkan ke Kejaksaan Negeri.

2. Substansi penindakan memiliki strategi koordinasi lebih dini dan intens terhadap 2 (dua) institusi yang berperan penting untuk keberhasilan penyelesaian proses pemberkasan (proses P21 dan serah tahap II). Kedua institusi tersebut yaitu Kejaksaan Tinggi dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng khususnya Korwas PPNS. Kerjasama yang baik ini, tentunya berpengaruh dalam penyelesaian Berkas Perkara dari penyerahan SPDP, serah tahap 1 sampai dengan Tahap II.
3. Kegiatan intelijen dan siber di TW I turut berperan dalam memberikan dampak terhadap capaian indikator persentase keberhasilan penindakan, yaitu monitoring keberadaan tersangka yang tidak ditahan sehingga pada saat dilakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti (serah tahap II) ke Kejaksaan Negeri menjadi lebih mudah dan lebih cepat.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.**

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	85	39	45,88	 Perlu Upaya Keras

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang pada TW I Tahun 2025 sebesar 39% yang berarti mencapai 45,88% dari target tahunan sebanyak 85% sehingga masih **Perlu Upaya Keras** untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Tahun 2025. Hal ini terjadi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga pencapaiannya baru dapat tercapai di akhir Tahun 2025.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

- Banyaknya perkara carry over tahun 2024 yang dapat diselesaikan prosesnya sampai dengan serah tahap II.
- Koordinasi yang baik dan intensif dengan lintas sektor (Direskrimsus Polda Jawa Tengah/Korwas PPNS Polda Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) mendorong cepatnya penyelesaian berkas perkara.
- Pemantauan keberadaan tersangka sehingga pada saat dilakukan serah tahap II dapat segera dilakukan.
- Koordinasi yang baik dan intensif dengan Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI.
- Koordinasi yang baik dan intensif dengan lintas sektor lain seperti Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, Bank Indonesia, BNNP Jawa Tengah, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan Penyedia Jasa Layanan Sambungan Telepon dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan obat dan makanan

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Hal yang mendukung tercapainya Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Semarang dipengaruhi oleh tahap dalam proses penyidikan yaitu penyerahan SPDP, penyelesaian berkas perkara Ke Korwas PPNS Polda Jawa Tengah (serah tahap I), tahap P21, dan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri (serah tahap II). Perhitungan yang tepat dalam perencanaan setiap tahap tersebut sangat berpengaruh terhadap capaian persentase keberhasilan penyidikan agar sesuai dengan perencanaan.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	813.876.000	75.992.200	9,34	111,429	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien. Capaian indikator 111,429% karena banyaknya perkara *carry over* tahun 2023 yang dapat diselesaikan prosesnya sampai serah tahap II pada TW I. Namun demikian apabila dilihat dari realisasi anggaran cukup kecil yaitu sebesar 9,34%, hal ini terjadi karena adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga untuk pekerjaan serah tahap II ke daerah (Kejaksaan Negeri) serta perjalanan invstigasi dilakukan beberapa efisiensi.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- Sinergi dengan lintas sektor antara lain dengan Direskrimsus Polda Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, BNNP Jawa Tengah, Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dan Pengelola Rumah Barang Sitaan Semarang yang diwujudkan dengan pertemuan koordinasi tahunan dapat meningkatkan kerja sama yang baik dengan PPNS Balai Besar POM di Semarang.
- Program peningkatan kompetensi baik PPNS maupun petugas intelijen yang dilakukan secara mandiri setiap tahun oleh Balai Besar POM di Semarang dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam hal mengungkap perkara dan pelaku tindak pidana obat dan makanan dengan akurat dan efektif.
- Program pengadaan alat khusus intelijen dapat meningkatkan keberhasilan petugas intelijen dalam mengungkap perkara dan pelaku tindak pidana obat dan makanan.

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja TW I Tahun 2025 dan interim triwulanan TW I Tahun 2025, dapat diketahui bahwa capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang melampaui target namun demikian ada perkara *carry over* yang masih menjadi tugas dan tanggung jawab PPNS Balai Besar POM di Semarang yang belum diselesaikan sebanyak 2 (dua) serta target perkara tahun 2025

sebanyak 7 (tujuh) perkara Untuk itu adanya Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai control dalam mencapai target pada TW selanjutnya sehingga target tahunan dapat tercapai sesuai perencanaan.

SK 7. TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMANTAUAN SIBER DAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF

Tabel Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 7

No.	Sasaran Kegiatan	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK)					100,00

SK 7. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 7 yaitu Sebesar **100 (Baik)**. Ini menandakan bahwa telah terlaksana kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif.

IKU 20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Target Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 adalah 14 (empat belas) laporan yang terdiri dari 12 (dua belas) laporan analisis penjejak digital (laporan *takedown*), 1 (satu) laporan hasil tindak lanjut rekomendasi kejahatan obat dan makanan, dan 1 (satu) laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan.

- Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025

Tabel ... Realisasi Kinerja **Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang**

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00
				Baik

Laporan analisis penjejak digital (laporan *takedown*) dilakukan tiap bulan maksimal tanggal 23 tiap bulannya. Untuk TW I telah tercapai 50% yang berarti sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian bernilai 100% dengan kriteria **baik**.

- Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55,56	 Perlu Upaya Keras

Target sebesar 50% merupakan capaian dari Laporan analisis penjejakan digital (laporan *takedown*) yang dilakukan tiap bulan. Sedangkan sisa target untuk mencapai 90% adalah 1 (satu) laporan hasil tindak lanjut rekomendasi kejahatan obat dan makanan, dan 1 (satu) laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan yang sesuai perencanaan dilakukan pada TW 3 dan TW 4. Hal ini terjadi karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga pencapaiannya baru dapat tercapai di akhir Tahun 2024.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan kinerja

- Pengajuan *takedown* melalui inawebcrawler.id dengan maksimal input tanggal 23 di tiap bulannya sehingga ketika Direktorat Siber Obat Makanan menarik data pada tanggal 25 tiap bulannya data sudah dinyatakan lengkap.
- Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan dilakukan perencanaan pada TW 3 dan penyusunan pada TW 4 (sebelum bulan Desember) sehingga di akhir tahun laporan sudah lengkap.
- Pengisian data profiling dan data kerawanan kejahatan di awal bulan dikarenakan ketika menjelang akhir bulan web Aplikasi Dashboard Penindakan sering ada kendala karena terlalu banyak akses.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Pencapaian kinerja yang telah sesuai target pada TW I menjadi dasar agar pelaporan tetap dilaksanakan dengan tertib tiap bulan dan pelaksanaan monitoring agar sesuai dengan perencanaan.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	122.167.000	-	-	100,000	Tidak Efisien

Pelaksanaan IKU 20 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar ini tidak memerlukan anggaran di DIPA.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- Peningkatan kompetensi petugas siber obat dan makanan melalui video tutorial dari youtube terkait penggunaan web/aplikasi OSINT (*Open Source Intelligence*)

- Koordinasi dengan Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM terkait permohonan bantuan profilking terhadap akun yang diduga melakukan tindak pidana obat dan makanan yang diperoleh dari patroli siber.

▪ Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja bermanfaat sebagai kontrol terhadap capaian terhadap target pada TW I sehingga bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan pelaksanaan kinerja pada TW selanjutnya. Selain itu Laporan Kinerja juga dapat digunakan untuk mengetahui kinerja Badan POM dalam melindungi Masyarakat dari obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar/persyaratan khususnya pengawasan terhadap aktifitas distribusi secara online.

SK 8. LAYANAN PUBLIK BBPOM DI SEMARANG YANG PRIMA

Tabel Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 8

No.	Sasaran Kegiatan	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
8	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang			
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK)					

SK 8. Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima diukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 8 belum terealisasi.

IKU 21. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Evaluasi terhadap Pelayanan Publik di BBPOM di Semarang dilaksanakan untuk mengetahui implementasi penerapan kebijakan pelayanan publik serta untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik BBPOM di Semarang.

Penilaian kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) dikenal dengan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai BPOM (Biro Hukum dan Organisasi) dan penetapan Indeks Pelayanan Publik (IPP) oleh Kementerian PANRB.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik BBPOM di Semarang berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%)

Penilaian aspek Kebijakan Pelayanan meliputi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat

2. Profesionalisme SDM (25%)

Penilaian aspek profesionalisme SDM meliputi kompetensi, responsivitas, kode etik, pemberian reward dan punishment dan budaya pelayanan

3. Sarana Prasarana (18%)

Penilaian aspek Sarana dan Prasarana meliputi kenyamanan ruang tunggu dan fasilitas lainnya, sarana dan prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, sarana prasarana front office dan sarana penunjang lainnya.

4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%)

Penilaian aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik meliputi Sistem Informasi Elektronik dan Sistem Informasi Non Elektronik

5. Konsultasi dan Pengaduan (10%)

Penilaian aspek konsultasi dan pengaduan meliputi ketersediaan sarana dan media konsultasi dan pengaduan yang bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, akuntabilitas dan tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan.

6. Inovasi (12%)

Penilaian aspek Inovasi meliputi penciptaan inovasi pelayanan public yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dukungan sumber daya untuk keberlanjutan inovasi tersebut.

Tabel....Kategori Indeks Pelayanan Publik

Range	Nilai Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50)	B-	Baik (Dengan Catatan
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik

4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
-------------	---	-----------------

▪ **Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025**

Tabel ... Realisasi Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
-----	-----	-------------	-----------	-------------

Berdasarkan data pada tabel diatas, tidak terdapat target, realisasi, maupun capaian Indeks Pelayanan publik BBPOM di Semarang TW I Tahun 2025 dikarenakan pelaksanaan PEKPPP untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) dilakukan setiap tahun sehingga target yang ditetapkan adalah target tahunan.

Pelaksanaan PEKPPP terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu Pemantauan Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, PEKPPP Mandiri, dan PEKPPP Khusus. Pada TW I dilakukan Pemantauan Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau tindak lanjut yang dilaksanakan oleh BBPOM di Semarang atas rekomendasi yang sudah diberikan kegiatan PEKPPP tahun sebelumnya. Hal ini penting untuk mendorong perbaikan kinerja pelayanan secara terus menerus untuk mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna layanan yang jauh lebih baik di masa depan. Upaya perbaikan secara maksimal, pemenuhan data dukung, dan perbaikan berkelanjutan pada seluruh aspek penilaian sebagai unit penyelenggara pelayanan publik harus dilakukan sehingga BBPOM di Semarang mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.**

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
-----	-----	-------------	-----------	--------------	------------

Berdasarkan data pada tabel diatas, tidak terdapat target realisasi, maupun capaian Indeks Pelayanan publik BBPOM di Semarang TW I Tahun 2025 dikarenakan pelaksanaan PEKPPP untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) dilakukan setiap tahun sehingga target yang ditetapkan adalah target tahunan, realisasi dan capaian juga diperoleh di akhir Tahun 2025.

Niai indeks pelayanan publik BBPOM di Semarang Tahun 2024 sebesar 4,92 telah melebihi target Tahun 2025 yaitu 4,70, namun BBPOM di Semarang harus terus melakukan perbaikan aspek pelayanan publik secara menyeluruh dan berkesinambungan agar dapat selalu memberikan Pelayanan Prima dan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 ini.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Pelaksanaan PEKPPP untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) dilakukan setiap tahun sehingga pada TW I Tahun 2025 belum terdapat realisasi dan capaian sehingga belum dapat ditentukan Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim penilai internal Badan POM, UPP Balai Besar POM di Semarang masih perlu terus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian, melalui upaya sebagai berikut:

1. Monev SP agar lebih luas lagi cakupannya, tidak hanya dalam aspek pemenuhan SLA. Dapat juga mereviu hal-hal yang perlu perbaikan berdasarkan SKM dan masukan dari pelanggan, atau misalnya jika ada perubahan kebijakan dari supra sistem.
2. Rencana tindak lanjut untuk SKM Mandiri (bulanan) dapat dirumuskan sebagai tahapan-tahapan pendek untuk menuju hasil utama yang ingin diperbaiki dalam jangka panjang, sehingga proses penyelesaian TL dapat selesai 100% pada bulan berikutnya.
3. Dapat melakukan sinkronisasi pemutakhiran informasi dari sosial media ke subsite, sehingga pemutakhiran informasi bisa dilakukan harian.
4. Aktif berpartisipasi dalam kompetisi inovasi baik di lingkungan internal BPOM maupun di tingkat nasional (KIPP).

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
		688.354.000	22.864.600	3,32		

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum terlihat tingkat efisiensinya karena indikator ditargetkan pada TW IV Tahun 2025 dan belum terdapat capaian di TW I Tahun 2025. Penggunaan anggaran pada TW I mencapai 3,32% dari pagu yang dianggarkan.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Berbagai upaya dilakukan BBPOM di Semarang dalam rangka meraih kategori penilaian "Pelayanan Prima", yaitu pemenuhan persyaratan/klausul penilaian secara maksimal untuk seluruh 6 (enam) aspek penilaian. Berdasarkan penilaian/evaluasi mandiri, terdapat 3 (tiga) aspek mendapatkan nilai maksimal dibandingkan dengan pencapaian tahun 2024 yaitu Aspek Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, dan Konsultasi dan Pengaduan. BBPOM di Semarang terus berupaya

mencapai nilai IPP maksimal dengan melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim penilai internal Badan POM antara lain:

1. Pelaksanaan rapat pembahasan dalam rangka review Standar Pelayanan Publik BBPOM di Semarang No. B-HM.11.02.9A.11.24.3332 Tahun 2024 pada tanggal 7 Maret 2025 yang akan ditindaklanjuti dengan Penetapan standar pelayanan tahun 2025 dengan melibatkan unsur penta helix (Pemerintah, Pelaku Usaha, Masyarakat, Akademisi, dan Media) di Forum Konsultasi Publik maupun *Public Hearing*. Standar pelayanan telah mengalami beberapa perubahan antara lain: adanya penambahan jenis layanan Penerbitan Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan, penerimaan sampel oleh petugas di layanan Mal Pelayanan Publik (MPP), penurunan timeline pengujian Pangan dan Obat Tradisional, serta perubahan format lampiran Standar Pelayanan untuk memudahkan pengguna layanan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan komprehensif.
2. Publikasi Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan di berbagai media;
3. Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tidak lebih dari 1 bulan;
4. Peningkatan peran dan profesionalisme SDM dengan menerbitkan SK pelaksanaan tugas Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional ataupun pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja, dll
5. Penetapan kode etik, kode perilaku, budaya pelayanan yang harus dipatuhi oleh seluruh petugas pelayanan publik, termasuk mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi untuk petugas pelayanan publik;
6. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik yang memadai termasuk untuk kelompok rentan;
7. Secara berkelanjutan memberikan pendidikan/pelatihan untuk peningkatan kompetensi, pemberian beasiswa, coaching/mentoring, *capacity building* dan mekanisme lainnya guna untuk memotivasi, meningkatkan kualitas petugas layanan publik, dan konsistensi penerapan budaya pelayanan prima.
8. Upaya pemutakhiran data dan informasi yang dilakukan setiap hari didukung dengan aplikasi maupun sistem;
9. Sistem antrian di ruang layanan publik berfungsi dengan baik serta tersedia untuk kelompok prioritas.
10. Tersedianya inovasi yang mendukung pelayanan publik MELON MANIS (Melalui Online Memberikan Informasi), Layanan CEKATAN (Layanan Pengecekan Laboratorium untuk Masyarakat dan Sekolah), LAKONE SEKTI ((LAYanan KONSultasi Efektif Sertifikasi registrasi obat dan makanan), SOS (Sinai Online Sareng), serta GUMREGAH (Nggugah UMKM Resik Saking Bahan Berbahaya). Inovasi GUMREGAH telah berhasil meraih TOP 24 dalam Kompetisi Inovasi KOIN BPOM 2024. Di Samping itu, Inovasi PIJAR MENTARI (Pendampingan Ijin Edar Menuju UMKM Pintar dan Mandiri), SHARA SEHAN (SHaring InfoRmAsiTentang Obat & Pangan SEHat dan AmAN), SENTUH BPOM (Sarana Nyaman dan Terpadu untuk Tuna Netra dan Tuna Rungu di BBPOM), JAMU SERBAT (Janji Temu Solusi Evaluasi Responsif Perbaikan dan Pencegahan Terintegrasi), dan SI MONCER (Sistem Monitoring Evaluasi CAPA Terintegrasi) merupakan inovasi baru tim AOC

BBPOM di Semarang 2025 yang masih dalam tahap pengembangan yang akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik BBPOM di Semarang.

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2024/interim triwulanan TW I Tahun 2025, dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik BBPOM di Semarang Tahun 2025.

SK 9. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Tabel Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Ke 9

No.	Sasaran Kegiatan	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang			
		Nilai AKIP BBPOM di Semarang			
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang			
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang			
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK)					

SK 9. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal di ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 8 belum terealisasi.

IKU 22. Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan bentuk komitmen BPOM dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi (RB) pada seluruh level organisasi secara berkelanjutan.

Pembangunan ZI adalah upaya percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima.

Pembangunan ZI mencakup dua komponen, yaitu komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%). Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (governance) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Komponen pengungkit terdiri dari enam area, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Komponen hasil terdiri dari Nilai Persepsi Anti Korupsi, Capaian Kinerja, serta Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Publik. Dalam Komponen pengungkit terdapat aspek pemenuhan dan aspek reform.

Rincian bobot komponen penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK / Menuju WBBM adalah sebagai berikut:

1. Komponen Pengungkit sebesar 60%, terdiri dari:
 - a. Manajemen Perubahan 8%
 - b. Penataan Tatalaksana 7%
 - c. Penataan Sistem Manajemen SDM 10%
 - d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
 - e. Penguatan Pengawasan 15%
 - f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%
2. Komponen Hasil sebesar 40%, terdiri dari:
 - a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 22,5%, terdiri dari
 - i. Nilai Survey Persepsi Korupsi 17,5%
 - ii. Capaian kinerja 5%
 - b. Pelayanan publik yang prima 17,5%.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran. Target nilai pembangunan ZI Balai Besar POM di Semarang tahun 2025 adalah 92,43.

▪ Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025

Tabel ... Realisasi Kinerja **Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang**

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
-----	-----	-------------	-----------	-------------

Desk evaluasi ZI Tahun 2025 akan dilaksanakan pada 2 Mei 2025. Dan karena Indeks Pembangunan ZI ini direalisasikan di akhir tahun maka di TW ini belum terdapat realisasi yang dapat dilaporkan. Pada TW I telah dilakukan evaluasi mandiri terhadap Pembangunan Zona Integritas di BBPOM di Semarang menggunakan indikator-indikator yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas dan hasilnya adalah nilai komponen pengungkit 99,66 dan komponen hasil 96,06, sehingga didapatkan nilai akhir sebesar 98.22. Namun hasil ini belum bisa dibandingkan terhadap target, karena perhitungan capaiannya adalah dengan membandingkan antara target yang direncanakan adalah target tahunan.

▪ **Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.**

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
-----	-----	-------------	-----------	--------------	------------

Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang belum dapat direalisasikan di TW I karena di targetkan di akhir tahun 2025.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Pada TW I telah dilakukan program-program sebagai berikut:

Pokja I Manajemen Perubahan

1. Pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas 2025 yang beranggotakan seluruh pegawai melalui Surat Keputusan Kepala Balai no HK.02.02.9A.01.25.21 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang.
2. Pembentukan pemimpin perubahan dan agen perubahan tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Balai no PL.06.01.9A.01.25.14.2 Tahun 2025 dan membentuk Tim Pendukung Agen Perubahan 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Balai no HK.02.02.13A.13A5.01.24.167.1 tahun 2024.
3. Penetapan SK Renja ZI 2025 sesuai dengan Keputusan Ka BBPOM di Semarang No HK.02.02.9A.03.25.29 Tahun 2025 tentang Penetapan target prioritas dan rencana kerja pembangunan ZI di lingkungan BBPOM di Semarang tahun 2025
4. Penetapan Project Action Plan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi BBPOM di Semarang tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025.
5. Penetapan target capaian zona integritas dalam Dokumen Perencanaan BBPOM di Semarang berupa dokumen Rencana Kinerja 2025 dan Perjanjian Kinerja 2025
6. Internalisasi RB dilakukan secara berkala (harian,mingguan, bulanan) melalui

- a. Anouncer/Audio : sambutan selamat datang, reminder presensi kehadiran , internalisasi BerAKHLAK Insan SoPan, memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk hari Senin dan Kamis, mendengarkan pembacaan naskah Pancasila hari Selasa dan Jumat, mendengarkan pembacaan naskah Panca Prasetya KORPRI, Maklumat Pelayanan BBPOM Semarang, Internalisasi 6 Area Perubahan
 - b. Artefak/Visual : Stiker pada mobil dinas (Lapor KaBalai, Layanan Cekatan), running text pada ruang tunggu pelayanan, standing banner, spanduk, poster, sticker di tangga, scan QR
 - c. Audio visual : rekaman video Fosil Antik SIP yang ditayangkan pada ruang tunggu tamu di lobi kantor, konten-konten edukatif media sosial BBPOM Semarang
7. Sosialisasi RB kepada stakeholder melalui media sosial: Footer "BerAKHLAK" pada konten media sosial BBPOM Semarang, konten "Lapor KaBalai" jika masyarakat menemukan pelanggaran/pungli oleh Pegawai
 8. "Padi Manis Glow Up" Paparan dan Diseminasi Manajemen Perubahan setiap kamis pada kegiatan apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai secara daring dengan tagline : I share, You care, We are aware.

Pokja II Penataan Tata Laksana

1. Penyusunan dokumen evaluasi SOP mengacu pada proses bisnis instansi
2. Penyusunan rencana kaji ulang dokumen 2025 untuk 4 ISO (ISO 9001:2015, ISO 17025:2017, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016)
3. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, yaitu melalui menu Kibas Rambut pada aplikasi Lawangsewu.
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam operasionalisasi SDM melalui aplikasi siasn, yaitu monitoring jumlah capaian JP seluruh pegawai.
5. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan kepada publik
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan tindak lanjut

Pokja III Pengelolaan SDM

1. Menyusun cascading kinerja kepala upt sd individu
2. Rencana aksi (perubahan di pengembangan kompetensi)
3. Dengan menggunakan ideas agar tercapai 20JP

Pokja IV Penguatan Akuntabilitas

1. Rapat Monev Internal (5 Februari 2025)
2. Bimtek SAKIP 2024 (10-12 Februari)
3. Sosialisasi Renja saat menjadi pembina apel Kamis (20 Feb 2025)
4. Sosialisasi Bimtek Sakip (27 Feb 2025)

5. Rapat Monev Februari Sudah Terlaksana tanggal 6 Maret 2025
6. Telah diadakan Rapat dan penetapan SK Reward Punishment 2025 pada tanggal 24 Maret 2025
7. Telah terlaksana Penyampaian reward Punishment Semester 2 2024

Pokja V Penguatan Pengawasan

1. Laporan gratifikasi dan benturan kepentingan TW 4 2024
2. Laporan WBS dan pengaduan masyarakat bulan Desember 2024, Januari 2025, dan Februari 2025
3. Laporan SPKP dan SPAK bulan Desember 2024, Januari 2025, dan Februari 2025
4. Laporan Si Bergas bulan Januari dan Februari 2025
5. Laporan benturan kepentingan pegawai melalui Sang Integritas
6. Kampanye integritas melalui Fosil Antik: nilai kejujuran, larangan gratifikasi saat hari raya, dan sosialisasi langsung
7. Sosialisasi program kerja Pokja V dan hasil survei WBS melalui apel virtual
8. Penyusunan MPH dan rencana kerja Pokja V
9. Pengisian LKE ZI dan data dukungnya
10. Update data potensi benturan kepentingan
11. Penandatanganan pakta integritas pegawai dan penyedia barang/jasa
12. Pembuatan Surat Edaran Larangan Gratifikasi dan Penyuapan ke lintas sektor dan asosiasi
13. Survei pemahaman pegawai tentang WBS

Pokja VI Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat bulan Januari, Februari, dan Maret 2025
2. Penyusunan laporan SKM bulan Februari 2025 dan tindak lanjut SKM bulan Januari 2025
3. Publikasi hasil SKM bulan Februari 2025
4. Penetapan Petugas Yanblik Terbaik bulan Januari 2025
5. Penetapan Petugas Yanblik Terbaik bulan Februari 2025 atas nama Eni Zuniati dan Chusnul M.H.
6. Penyusunan laporan akuntabilitas hasil konsultasi dan pengaduan bulan Januari dan Februari 2025 beserta tindak lanjutnya
7. Penyusunan draft revisi Standar Pelayanan Publik
8. Pemasangan Maklumat Pelayanan di ruang tunggu layanan
9. Penyusunan Maklumat Pelayanan dalam bahasa Jawa
10. Penyusunan laporan SPKP dan SPAK bulan Januari dan Februari 2025

11. Penyusunan infografis layanan publik SKI dan SKE
12. Update informasi pada subsite (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM, dan lainnya)
13. Penyusunan dan pemutakhiran data dukung sarana dan prasarana pelayanan publik
14. Pengisian dan penyusunan data dukung LKE Zona Integritas
15. Penyusunan MPH (Maklumat Pelayanan Harian) anggota Tim Pokja 6
16. Penyusunan Renja (Rencana Kerja) Pokja 6

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Rekomendasi Perbaikan Kinerja untuk Nilai Pembangunan ZI :

1. Optimalisasi Inovasi-inovasi yang sudah berjalan
2. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja berkala
3. Peningkatan Pengembangan Kompetensi di bidang pembangunan ZI
4. Pengembangan Reward Punishment bagi Pegawai BBPOM di Semarang

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
		240.000.000	28.960.680	12,07		

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat ditentukan efisien atau tidak, karena Realisasi IKU ditargetkan di akhir tahun.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

1. Penyusunan Cascading/MPH mengikuti Manual IKU
2. Pelaksanaan Sejalan dengan LKE Zi
3. Optimalisasi Inovasi-inovasi yang sudah berjalan

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja 2024 dilakukan Penyempurnaan Inovasi-inovasi di BBPOM di Semarang

IKU 23. Nilai AKIP BBPOM di Semarang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja dan;
5. Penilaian pencapaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang dapat digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP antara lain:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu:

- a. Komponen: terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Capaian Kinerja.
- b. Sub-komponen: dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
- c. Kriteria: Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Inspektur Utama. LKE kemudian dianalisis dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Variabel dalam LKE AKIP BPOM diatur lebih rinci melalui Surat Edaran Inspektur Utama. Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan "Professional Judgements" dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan

pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi. Setiap sub komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan. Penilaian dilakukan melalui aplikasi SAPA APIP (Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawas Intern Pemerintah).

Penilaian hasil SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Satuan Kerja/Unit Kerja organisasi, tetapi hasil evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Satuan Kerja/Unit Kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90 - 100)	Sangat memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
A (Nilai >80 - 90)	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
BB (Nilai >70 - 80)	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
B (Nilai >60 - 70)	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
CC (Nilai >50 - 60)	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.

Predikat	Interpretasi
C (Nilai >30 - 50)	Kurang. Sistem dan catatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D (Nilai >0 - 30)	Sangat kurang. Sistem dan catatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

BOBOT PENILAIAN

Komponen Penilaian	BPOM
Perencanaan Kinerja	24
Pengukuran Kinerja	24
Pelaporan Kinerja	12
Evaluasi Internal	20
Capaian Kinerja	20
Total	100

Sesuai Kepka BPOM Nomor 331 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan

▪ Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025

Tabel ... Realisasi Kinerja Nilai AKIP BBPOM di Semarang

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang			

Monitoring dan evaluasi rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Dan karena nilai AKIP ini direalisasikan di akhir tahun maka di TW ini belum terdapat realisasi yang dapat dilaporkan.

▪ Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82			

Berdasarkan data pada tabel diatas, tidak terdapat target realisasi, maupun capaian Nilai AKIP BBPOM di Semarang TW I Tahun 2025 dikarenakan lku ini ditargetkan di akhir tahun.

▪ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan Nilai AKIP adalah:

1. Menyusun Cascading/MPH tim AKIP berdasarkan LKE AKIP, agar pengumpulan dokumen dapat dilaksanakan setiap TW tidak pada saat menjelang desk SAKIP.
2. Dalam penyusunan dokumen SAKIP setiap bulan mematuhi timeline yang telah diberikan oleh Roren melalui surat resmi setiap TWnya.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Rekomendasi Perbaikan agar nilai AKIP meningkat yaitu:

- Dalam penyusunan dokumen SAKIP setiap bulan mematuhi timeline yang telah diberikan oleh Roren melalui surat resmi setiap TWnya.
- Koordinasi Tim harus tetap terjaga

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK.....

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	240.000.000	28.960.680	12,07		

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat ditentukan efisien atau tidak, karena Realisasi IKU ditargetkan di akhir tahun.

▪ **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

- Di bulan Maret Penyusunan Cascading/MPH tim AKIP berdasarkan LKE AKIP dan PK 2025,
- Penetapan PK berdasar Kesepakatan bersama dengan Unit Pengampu
- Penetapan target RAPK sejalan dengan pagu anggaran
- Penyusunan Lakip dan Laptah 2024 dan penguploadan tepat waktu di esr menpan dan drive Roren

▪ **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja 2024 dilakukan perbaikan berupa dokumen yang belum selaras, pendokumentasi Tindak Lanjut atas rekomendasi Lakip 2024, dan perbaikan-perbaikan dokumen sakip lainnya.

IKU 24. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang

Nilai Kinerja Anggaran adalah hasil penjumlahan dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (PMK. No 62 Tahun 2023). Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART.

Realisasi nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Semarang triwulan I tahun 2025 sebagaimana dilihat pada laman <https://monev.kemenkeu.go.id/> adalah 55,96 . Nilai ini diperoleh dari 50% nilai kinerja Perencanaan Anggaran 11,92 dan 50% nilai kinerja Pelaksanaan Anggaran 100,00.

https://monev.kemenkeu.go.id/app/2025/nilai-kinerja-anggaran

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Role: Pilih TA (2025) Logout

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	969.01.432762	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	11,92	100,00	55,96

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 (delapan) indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Delapan (8) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, serta Dispensasi SPM. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OM SPAN. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai **(PMK) Nomor 62 Tahun 2023** tentang *Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*

Tahun 2025 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dihitung berdasarkan 3 Aspek yaitu Efektivitas (Capaian RO) 75%, Penggunaan SBK (10%) dan Efisiensi SBK (15%). Pada triwulan I berdasarkan aplikasi e monev pada laman <https://monev.kemenkeu.go.id/> terlihat bahwa Efektivitas capaian Ro yang mempunyai porsi 70% mendapatkan nilai 15,89 sedangkan Efisiensi Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK nilainya masih 0.

▪ Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025

Tabel ... Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang			

Pada Triwulan I, belum terdapat realisasi kinerja yang dihasilkan maupun target kinerja yang ditetapkan. Hal ini karena tidak ada target yang ditetapkan, maka tidak dapat diukur atau dilaporkan sebagai capaian kinerja. Nilai Kinerja anggaran baik target dan capaian akan terukur di Triwulan IV.

▪ Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	91,02			

Berdasarkan tabel di atas target Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 adalah 91,02 , namun meskipun target di tahun 2025 telah tersedia sebagai acuan ,namun capaian Triwulan I belum dapat dilaporkan karena belum terdapat hasil kerja yang dapat diukur dan dibandingkan secara langsung.

▪ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pembukaan blokir untuk Pengadaan Belanja Modal, baru mulai di bulan Maret, sehingga perlu penyesuaian RPD untuk TW II-IV

- **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**
 - Melaporkan kinerja melalui aplikasi SMART dan aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat
 - Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - Menyusun dan merealisasikan anggaran berdasarkan POA dan RPD sesuai dengan target triwulanan yang ditetapkan Kementerian Keuangan.
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala .
- **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	19.136.242.000	4.307.678.974	22,51		

Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber Daya merupakan proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai seberapa optimal sumber daya (anggaran, SDM, waktu, sarana/prasarana) digunakan untuk mencapai Kinerja /hasil (output) yang telah direncanakan. Berdasarkan tabel diatas Realisasi Anggaran di Triwulan I adalah sebesar Rp 4.307.678.974,- atau sebesar 22,51%. Namun, capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan tingkat efisiensi belum dapat diukur.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
 - percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.,
 - peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran,
 - Proses penyusunan anggaran belanja berkualitas melalui komitmen yang kuat dari pimpinan satuan kerja
 - pemantauan dan evaluasi berkala terhadap capaian output.
 - optimalisasi penggunaan anggaran secara efisien,
- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Dokumen Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan, program, atau kegiatan di masa mendatang.

IKU 24. Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang

Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Manajemen risiko digunakan dalam konteks mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM dalam pencapaian tujuan. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
2. Menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan
3. Melindungi organisasi dari risiko yang signifikan yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi
4. Meningkatkan kinerja organisasi di dalam pencapaian tujuan
5. Menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya Manajemen Risiko

Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Indeks maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko.

Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Kinerja TW I Tahun 2025

Tabel ... Realisasi Kinerja **Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang**

No.	IKU	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)
25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang			

Sampai dengan triwulan I belum ada realisasi karena belum dilakukan penilaian Indeks Manajemen Risiko oleh Inspektorat.

Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2025.

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan Target Tahun 2024 IKU...

No.	IKU	Target 2025	Realisasi	Capaian 2025	Notifikasi
25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,6			

Sampai dengan triwulan I belum ada realisasi karena belum dilakukan penilaian Indeks Manajemen Risiko oleh Inspektorat.

▪ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Upaya yang dilakukan BBPOM di Semarang untuk mendukung keberhasilan program penilaian Indeks Manajemen Risiko hingga Triwulan I ini adalah:

- Sosialisasi terkait IKU Indeks Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai melalui apel pagi virtual
- Integrasi manajemen risiko dengan manajemen kinerja pada aplikasi SIMAKIN dalam penyusunan SKP tahun 2025
- Pelaporan manajemen risiko semester I 2025 melalui aplikasi SAPAAPIP, yang meliputi Daftar Risiko semester I 2025, Rencana Tindakan Pengendalian, Pengujian Aktivitas Pengendalian dan Risiko Positif.

▪ **Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Semarang pada tahun 2024 sebesar 3.50 atau pada kategori tingkat maturitas 3 (*Risk Defined*). Untuk meningkatkan indeks manajemen risiko pada tahun 2025 ini telah dilakukan pelaporan manajemen risiko Semester I secara lengkap dan tepat waktu. Identifikasi risiko dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Seluruh Indikator Kinerja Utama telah diidentifikasi risikonya
- Penyebab risiko dan akibat/potensi kerugian telah diselaraskan dengan peristiwa risiko, di mana setiap risiko hanya ada satu penyebab
- Aktivitas pengendalian relevan dengan peristiwa risiko dan jumlah atribut pengendalian sama dengan jumlah aktivitas pengendalian
- Penilaian level risiko berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Balai POM di Semarang Nomor HK.02.02.9A.09.24.104 tanggal 23 September 2024 tentang Kriteria Level Kemungkinan dan Dampak Risiko Tim Penyelenggara Pengendalian Intern di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang.

▪ **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja**

Tabel ... Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja IK Indeks Manajemen Risiko

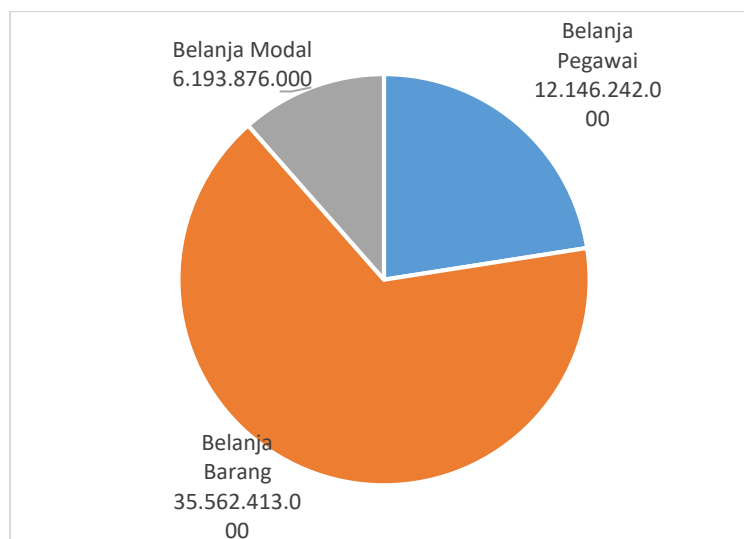
No.	Indikator	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian IKU (%)	Tingkat Efisiensi
25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	240.000.000	28.960.680	12,07		

Pada Triwulan I ini belum dapat dilakukan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dikarenakan realisasi Indeks Manajemen Risiko dapat dilihat di akhir tahun.

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
 - Pelaporan manajemen risiko dilakukan secara lengkap dan tepat waktu
 - Identifikasi risiko dilakukan pada seluruh IKU dan melibatkan seluruh Ketua Tim Kerja
 - Memastikan bahwa penyebab risiko, akibat/potensi kerugian, aktivitas pengendalian dan atribut pengendalian relevan dengan peristiwa risiko
 - Memanfaatkan fasilitasi dari APIP dalam peningkatan manajemen risiko
 - Melakukan sosialisasi pada seluruh pegawai terkait manajemen risiko
- **Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja**
 Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Semarang pada tahun 2024 sebesar 3.50 atau pada kategori tingkat maturitas 3 (*Risk Defined*) dan selanjutnya akan dilakukan peningkatan indeks manajemen risiko dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran BBPOM di Semarang tahun 2025 berdasarkan DIPA tahun 2025 Nomor SP DIPA- 063.01.2.432762/2025 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp. **53,902,531,000,-** dengan komposisi sesuai jenis belanja adalah sebagai berikut :



Grafik DIPA BBPOM Semarang - Awal

Selama periode Triwulan I, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang disebabkan oleh adanya Efisiensi Anggaran dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut :

- Revisi 01 DIPA pada Sekretaris Utama Badan POM, tanggal 10 Februari 2025, berupa Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025.
- Revisi 02 DIPA pada Sekretaris Utama Badan POM, tanggal 10 Februari 2025, tanggal 19 Februari 2025, berupa Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025.
- Revisi 03 DIPA pada Sekretaris Utama Badan POM, tanggal 11 Maret 2025, berupa Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal untuk Pemenuhan Honorarium PPNPN TA.2025.
- Revisi 04 DIPA pada Sekretaris Utama Badan POM, tanggal 25 Maret 2025, berupa Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA.2025.

Setelah mengalami revisi tersebut di atas, pada akhir triwulan I tahun 2025, DIPA BBPOM di Semarang masih sebesar Rp. 53.902.531.000,- dengan Blokir sebesar RP 28.409.946.000,- , anggaran Setelah dikurangi Blokir menjadi Rp. 25.492.585.000

Realisasi DIPA BBPOM di Semarang pada akhir triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 4.917.873.853,- atau 9,12% dengan realisasi perjenis belanja sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	12.146.242.000	3.234.304.947	26,63
2	Belanja Barang	35.562.413.000	1.584.168.906	4,45
3	Belanja Modal	6.193.876.000	99.400.000	1,60
	Jumlah	53.902.531.000	4.917.873.853	9,12

Tabel Realisasi Anggaran TW I per Jenis Belanja

Dari data diatas , realisasi anggaran pada jenis belanja barang dan belanja modal tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini bukan disebabkan oleh hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, melainkan merupakan adanya efisiensi anggaran melalui pemblokiran mandiri dalam rangka efisiensi belanja pelaksanaan APBN TA 2025.

Target	TW I	TW II	TW III	TW IV
Belanja Pegawai	15%	40%	65%	95%
Belanja Barang	15%	50%	70%	90%

Belanja Modal	10%	40%	70%	90%
---------------	-----	-----	-----	-----

Tabel. Target Realisasi yang ditetapkan Kemenkeu

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi dari kinerja diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input :

$$IE = \% \text{ Capaian Output} / \% \text{ Capaian Input}$$

No	Indikator	Output %	Input %	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	101,17%	5,01%	20,21	19,21	75%	Tidak Efisien
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,65%	11,40%	9,62	8,62	75%	Tidak Efisien
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	11,40%	8,77	7,77	75%	Tidak Efisien
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125,00%	11,40%	10,97	9,97	75%	Tidak Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70,72%	13,76%	5,14	4,14	75%	Tidak Efisien
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,32%	13,76%	7,29	6,29	75%	Tidak Efisien
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24,81%	13,76%	1,80	0,80	90%	Efisien
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103,36%	5,55%	18,64	17,64	75%	Tidak Efisien
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	125,00%	5,55%	22,54	21,54	75%	Tidak Efisien
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	115,90%	13,76%	8,42	7,42	75%	Tidak Efisien
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	22,24%	0,04%	560,30	559,30	75%	Tidak Efisien
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	117,20%	1,09%	108,01	107,01	75%	Tidak Efisien
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104,43%	0,27%	391,47	390,47	75%	Tidak Efisien
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	125,00%	0,82%	151,80	150,80	75%	Tidak Efisien
16	Jumlah desa pangan aman	89,29%	0,52%	171,76	170,76	75%	Tidak Efisien
18	Persentase UMKM yang didampingi	117,21%	4,09%	28,65	27,65	75%	Tidak Efisien
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan	111,43%	9,34%	11,93	10,93	75%	Tidak Efisien
Rata-Rata/Jumlah/Tingkat Efisiensi		97,81%	7,15%	13,68	12,68	75%	Tidak Efisien

Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat 1 indikator kinerja yang masuk kategori "Efisien", sedangkan indikator kinerja lainnya dikategorikan "Tidak Efisien" karena belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Tingkat Efisiensi diukur berdasarkan KRO pada triwulan I adalah sebagai berikut :

Kode	Kegiatan/KRO/RO	Output %	Input %	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
a	b	c	d	e	f	g	h
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	97,11%	30,18%	3,22	2,22	75%	Tidak Efisien
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	97,11%	30,18%	3,22	2,22	75%	Tidak Efisien
3165.BAH	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan[Base Line]	39,05%	3,32%	11,76	10,76	75%	Tidak Efisien
3165.BDC	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE[Base Line]	19,88%	0,21%	92,86	91,86	75%	Tidak Efisien
3165.BKB	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan[Base Line]	24,99%	2,28%	10,96	9,96	75%	Tidak Efisien
3165.BMB	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan[Base Line]	11,11%	9,11%	1,22	0,22	95%	Efisien
3165.CAN	Perangkat pengolah data dan komunikasi[Base Line]	100,00%	99,40%	1,01	0,01	100%	Efisien
3165.PDD	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium[Base Line]	24,99%	3,11%	8,03	7,03	75%	Tidak Efisien
3165.QCD	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan[Base Line]	18,68%	9,34%	2,00	1,00	88%	Efisien
3165.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]						
3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	25,00%	0,82%	30,36	29,36	75%	Tidak Efisien
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	25,00%	0,52%	48,09	47,09	75%	Tidak Efisien
3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	25,00%	7,62%	3,28	2,28	75%	Tidak Efisien
3165.QDC	Sarana Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans[Base Line]	100,00%	12,78%	7,82	6,82	75%	Tidak Efisien
3165.QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	28,33%	4,09%	6,92	5,92	75%	Tidak Efisien
3165.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]						
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa	11,44%	11,40%	1,00	0,00	100%	Tidak Efisien
3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar	13,74%	5,01%	2,74	1,74	78%	Tidak Efisien
3165.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]						
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	21,62%	13,76%	1,57	0,57	92%	Efisien
3165.QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa	6,89%	0,04%	173,62	172,62	75%	Tidak Efisien
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	20,13%	5,55%	3,63	2,63	75%	Efisien
6384	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	24,99%	22,27%	1,12	0,12	100%	Efisien
6384.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	24,99%	22,27%	1,12	0,12	100%	Efisien
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	24,99%	22,28%	1,12	0,12	100%	Efisien
Total					#DIV/0!		#VALUE!

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap KRO pada Triwulan I, terdapat beberapa 8 KRO yang menunjukkan capaian tingkat efisiensi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dikategorikan sebagai "Efisien". Sementara itu, terdapat pula beberapa 14 KRO yang belum memenuhi kriteria yang ditetapkan dan dikategorikan sebagai "Tidak Efisien", disebabkan oleh ketidakseimbangan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan.

BAB IV

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Capaian Kinerja diukur dari 9 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai BBPOM di Semarang pada TW I Tahun 2025 yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada TW I Tahun 2025, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR	Target 2025	TWI				NPSK
					Target	Realisasi	Capaian	Konversi	
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,00	87	88,02	101,17	101,17	107,11
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26					
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	93,20	109,65	109,65	
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar <i>(Tidak Masuk dalam Perhitungan NKO)</i>	100	100				
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125,00	110,00	
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	86	56	60,82	108,61	108,61	
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90,29	100,32	100,32	
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan <i>(Tidak Masuk dalam Perhitungan NKO)</i>	85	85				
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan <i>(Tidak Masuk dalam Perhitungan NKO)</i>	96,75	96,75				
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125,00	110,00	
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,87	85,87	99,52	115,90	110,00	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	54	16,82	15,89	94,47	94,47	94,47
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Semarang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	79,7	70,31	82,40	117,20	110,00	110,00
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang	86,42	86,42	90,25	104,43	104,43	103,43
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	20%	25%	125,00	110,00	
		16	Jumlah desa pangan aman	6	28%	25%	89,29	89,29	
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	20%	25%	125,00	110,00	

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR	Target 2025	TW I				
					Target	Realisasi	Capaian	Konversi	NPSK
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91	24,17	28,33	117,21	110,00	110,00
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Semarang	85	35	39	111,43	110,00	110,00
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100,00	100,00	100,00
8	Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Prima	21	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Semarang	4,70					
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Semarang	92,43					
		23	Nilai AKIP BBPOM di Semarang	82					
		24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Semarang	91,02					
		25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Semarang	3,6					
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)									105,00
									Istimewa

Dari hasil NPS diatas, diperoleh nilai sebesar 105,00% dengan kriteria “Istimewa”, Untuk hasil NPSK masing-masing 3 indikator menunjukkan dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” yaitu “Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang”, “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” dan “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang”. Kemudian 2 indikator menunjukkan hasil dengan kriteria “Sangat Baik” yaitu “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang” dan “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Semarang”. Kemudian 2 indikator menunjukkan hasil dengan kriteria “Baik” yaitu “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” dan “Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif”. Kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

10. SK 1. Meningkatkan efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang di ukur dengan 11 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 yaitu Sebesar **107,11 (Sangat Baik)**. Dari 11 IKU terdapat 4 iku tercapai dengan sangat baik, 3 IKU tidak dapat disimpulkan, 1 IKU di ukur di akhir tahun, dan 3 IKU tidak diukur karena di *exclude* dari perhitungan NPSS. Ini mendakan bahwa BBPOM Semarang telah efektif dalam mengawasi produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerjanya.
11. SK 2. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 yaitu Sebesar **94,47 (Baik)**. Ini mendakan bahwa BBPOM Semarang telah efektif dalam mengawasi Sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerjanya.
12. SK 3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Semarang di ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 yaitu Sebesar **110 (Tidak dapat**

disimpulkan). Ini mendakan bahwa BBPOM Semarang telah mampu menguatkan Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerjanya.

13. SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Semarang di ukur dengan 4 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 yaitu Sebesar **103,43 (Sangat Baik)**. Ini menandakan bahwa BBPOM Semarang telah efektif dalam melaksanakan KIE di wilayah kerjanya.
14. SK 5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 yaitu Sebesar **110 (Tidak dapat disimpulkan)**. Ini menandakan bahwa BBPOM Semarang telah mampu meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di wilayah kerjanya.
15. SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang di ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 yaitu Sebesar **110 (Tidak dapat disimpulkan)**. Ini menandakan bahwa telah terlaksana Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Semarang.
16. SK 7. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 7 yaitu Sebesar **100 (Baik)**. Ini menandakan bahwa telah terlaksana kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif.
17. SK 8. Layanan Publik BBPOM di Semarang yang Primadi ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 8 belum terealisasi.
18. SK 9. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal di ukur dengan 1 IKU yang dapat dilihat pada tabel di atas. Untuk Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 8 belum terealisasi.

3.2 Saran

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Konsistensi dalam penyusunan POA setiap triwulan dan saat revisi anggaran serta melakukan monitoring penggunaan anggaran dan capaian output
2. Monitoring Capaian Kinerja secara berkala dengan menindaklanjuti seluruh Hasil evaluasi SAKIP untuk capaian serta indikator kinerja yang tidak memenuhi target
3. Melakukan optimalisasi kinerja supaya semua target IKU tercapai